

AL-RISALAH

Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Praktik Penggunaan Metode Mengajar Oleh Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAI Rakha Amuntai

Ria Susanti

Filsafat Hermeneutika (Wawasan dan Kembali Ke Mitos)

Ramlan Thalib

Analisis Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Pada Kelas V dan VI Madrasah Ibtidaiyah

Helmiannoor

Pendidikan Antikorupsi (Tinjauan Teoritis dan Praktis Islami)

Noorazmah Hidayati

Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Mustofa Habib Burahman

Konsep Kurikulum di Sekolah

Musyarapah



Diterbitkan Oleh :
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
RASYIDIYAH KHALIDIYAH
(STAI RAKHA)
A M U N T A I

AL-RISALAH

**Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
terbit dua kali setahun, memuat tulisan
hasil telaahan dan kajian analistis-kritis,
maupun hasil penelitian sekitar
Kelslaman dan Kemasyarakatan sesuai
ilmu yang dikembangkan**

Pelindung / Penanggung Jawab

H. Munadi Sutera Ali

(Ketua STAI Rakha Amuntai)

Pemimpin / Ketua Pengarah

H. Fathillah Hanafi

Ketua Penyunting

Musyarapah

Sekretaris Penyunting

Azhari Arsyad

Penyunting Pelaksana

Noor Azmah Hidayati, Rahmani Abdi,

H. M. Arsyad Almakki, Ria Susanti,

Siti Anida Magfira

Penyunting Ahli

H. Munadi Sutera Ali, H. Taufikurrahman,

H. Ramlan Thalib, Rif'an Syafruddin

Tata Usaha & Keuangan

Garabiah Umar, H. Samlan Karman



Alamat Penyunting & Tata Usaha

Kantor STAI Rakha Amuntai

Jln. Rakha Pakapuran RT. 3 Amuntai Kab. HSU Prov. Kalsel 71471

Telp/Fax 0527- 61695

Email: stai_rakha@yahoo.co.id

AL – RISALAH

Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Volume 12, Nomor 1, Januari – Juni 2016

ISSN0216-664x

Daftar Isi :

1. Praktik Penggunaan Metode Mengajar Oleh Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAI Rakha Amuntai
Ria Susanti (1 – 14)
2. Filsafat Hermeneutika (Wawasan dan Kembali Ke Mitos)
Ramlan Thalib (15 – 36)
3. Analisis Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Pada Kelas V dan VI Madrasah Ibtidaiyah
Helmiannoor (37 – 50)
4. Pendidikan Antikorupsi (Tinjauan Teoritis dan Praktis Islami)
Noorazmah Hidayati (51 – 80)
5. Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Mustofa Habib Burahman (81 – 112)
6. Konsep Kurikulum di Sekolah
Musyarapah (113 – 136)

Redaksi menerima artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan misi jurnal. Panjang tulisan antara 12-20 halaman folio, diketik dengan spasi ganda dan disertai dengan identitas penulis. Redaksi berhak melakukan editing naskah, tanpa merubah maksud dan isinya.

**PRAKTIK PENGGUNAAN METODE MENGAJAR
OLEH MAHASISWA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI STAI RAKHA AMUNTAI**

Ria Susanti*

Abstrak:

One of the efforts of teachers in anticipating the emergence of difficulties or obstacles in student learning is to understand the position of teaching methods as one component in determining the success of teaching and learning activities. Knowledge and insight about this method of teaching should be introduced since the teacher/prospective teacher (still a student). Therefore, in every college especially the Department of Education there must also be courses on teaching methodology, and students also have the opportunity to practice the teaching method in the activity which is usually called "Teaching Practice".

Based on the above thinking, the research aims to describe what are the teaching methods of Islamic Education used in teaching practice activities by STAI Rakha Amuntai students. The type of this research is field research, the approach used in this research is qualitative approach. The subjects of this research are the students of Islamic Education STAI Rakha Amuntai of 2015 class: A/5, B/6 and C/7, semester IV classes pursuing subjects of Teaching methodology of Islamic education. And the object of research is the activity of practice of Teaching Method by the Students of Islamic Education at STAI Rakha Amuntai, that is what method they used in this activity. Data were collected using interviews, observations, and documentation.

Result of research: the method used by student in teaching practice is; Lectures, questions and answers, discussions, assignments/recitations, group work, exercises, demonstrations, and storytelling. And based on observations that researchers do, the researchers concluded that the activities of students practicing teaching methods of Islamic education can be categorized have been successful in practicing teaching methods of Islamic education.

Kata Kunci:

Practice, use of Islamic education teaching methods.

* *Penulis adalah Dosen STAI Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai.*

A. Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negeri yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Harapan yang paling utama dalam proses belajar mengajar di sekolah adalah peserta didik dapat mencapai hasil yang memuaskan atau hasil yang baik. Namun banyak kita jumpai peserta didik yang mengalami kesulitan ataupun mempunyai hambatan dalam proses belajarnya.

Pada umumnya kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang ditandai adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencegah timbulnya kesulitan atau hambatan dalam belajar tersebut peserta didik serta orang-orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan diharapkan dapat mengurangi timbulnya kesulitan tersebut.

Dalam hal ini guru dengan sadar berusaha untuk mengatur lingkungan belajar agar anak didik tetap bersemangat dalam menerima pelajaran dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki guru, seperti mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. Salah satu usaha guru yang dilakukan dalam mengantisipasi munculnya kesulitan atau hambatan adalah dengan memahami kedudukan metode pengajaran sebagai salah satu komponen dalam menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar.

Telebih lagi untuk guru Pendidikan Agama Islam/PAI.

¹ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 5

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa bunyi pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan yang Maha Esa” maka negara Indonesia pun sangat mengutamakan agama sebagai pedoman dalam kehidupan. Agama adalah peraturan atau undang-undang Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia. Fungsi agama sendiri untuk kehidupan manusia adalah untuk membentuk pribadi yang cakap/pandai dalam hidup di dalam bermasyarakat, menumbuhkan ketenangan hati, mengisi kekosongan hati dengan rasa khusuk mendekatkan diri kepada Allah (mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesama saudaranya). Oleh karena itu guru agama sangat berperan dalam hal tersebut.

Penggunaan metode mengajar yang tepat, merupakan suatu alternatif mengatasi masalah rendahnya daya serap siswa terhadap pelajaran tertentu, guna meningkatkan mutu pengajaran. Penerepan suatu metode pengajaran harus ditinjau dari segi keefektifan, keefisienan dan kecocokannya dengan karakteristik materi pelajaran serta keadaan siswa yang meliputi kemampuan, kecepatan belajar, minat, waktu yang dimiliki dan keadaan sosial ekonomi siswa sebagai objek pendidikan.

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.² Metode pendidikan Islam adalah cara-cara yang ditempuh dan dilaksanakan dalam pendidikan Islam agar mempermudah tercapainya tujuan pendidikan³.

Pengetahuan dan wawasan tentang metode pengajaran ini harus diperkenalkan sejak pengajar/guru itu masih menjadi mahasiswa/calon guru. Di setiap perguruan tinggi khususnya jurusan ketarbiyahan-pun pasti ada mata kuliah yang membahas tentang metodologi pengajaran/pembelajaran, serta juga berkesempatan langsung untuk mempraktikkan metode pengajaran tersebut dalam kegiatan yang

² H. Wina Sanjaya, **Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 2006** (Jakarta: Kencana-Prenadamedia) hal.147.

³ Ahmad Saebani, **Ilmu pendidikan Islam**, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hal. 260.

biasanya disebut “**Praktik Mengajar**”.

Kegiatan praktik mengajar ini bertujuan untuk melatih mahasiswa yang merupakan calon guru agar bisa langsung menerapkan dan mengaplikasikan segenap ilmu pengetahuan tentang metode pengajaran serta bisa mendapatkan pengalaman mengajar meskipun masih dalam lingkup *micro teaching*. Hal ini menurut peneliti penting untuk diteliti, untuk menggambarkan apa saja metode yang mahasiswa gunakan dalam pengajaran PAI, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: “**Praktik Penggunaan Metode Mengajar Oleh Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAI Rakha Amuntai**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa saja metode pengajaran PAI yang digunakan dalam kegiatan praktik mengajar oleh mahasiswa STAI Rakha Amuntai.

C. Kajian Teoritis

Terkait dengan judul penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini, maka peneliti menghimpun dua teori terkait dengan penelitian pada kali ini, yaitu: pengertian metode pengajaran PAI dan macam-macam metode pengajaran PAI. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengertian Metode Pengajaran PAI

Sebelum membahas tentang pengertian metode pengajaran PAI, maka kita harus mengenal pengertian metode pengajaran secara umum dahulu. Metode pengajaran adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang di rumuskan dalam silabus mata pelajaran.⁴

⁴ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hal. 5.

Kemudian pengertian metode pengajaran agama Islam/PAI adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan agama Islam. Kata tepat dan cepat inilah yang sering diungkapkan dalam ungkapan efektif dan efisien. Dengan demikian metode pengajaran agama Islam ialah cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam.⁵

2. Macam-macam Metode Pengajaran PAI

Secara umum macam-macam metode pembelajaran di antaranya adalah sebagai berikut; metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode penugasan/resitasi, metode latihan, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode sosiodrama, dan metode cerita.

Adapun metode khusus untuk pembelajaran Agama Islam seperti pada materi Aqidah akhlak, AlQuran Hadist, Fiqh, serta Sejarah Kebudayaan Islam pada dasarnya adalah sama saja dengan metode pembelajaran secara umum seperti telah disebutkan di atas. Semua metode pembelajaran bisa diaplikasikan untuk materi Agama Islam, asalkan sesuai dan cocok dengan kondisi siswa, tujuan pembelajaran, situasi belajar, fasilitas yang ada di sekolah serta sesuai dengan kemampuan guru tersebut.

Penjelasan tentang masing-masing metode di atas adalah sebagai berikut:

- a. Metode Ceramah; yaitu suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. Agar siswa efektif dalam proses belajar mengajar yang menggunakan metode ceramah, maka siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan berpikir untuk memahami suatu proses dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan mencatat penalarannya secara sistematis.⁶

⁵ Ahmad Tafsir, **Metodologi Pengajaran Agama Islam**, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 9.

⁶ Hafni Ladjid, **Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi**, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hal. 121.

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, Karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar.⁷

- b. Metode Tanya-Jawab; yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai pertanyaan yang dijawab siswa. Dalam metode ini, antara lain dapat dikembangkan keterampilan atau kemampuan mengamati, menginterpretasikan, mengklasifikasi,⁸ menarik kesimpulan, menerapkan, dan mengomunikasikan.⁸ Dalam buku lain juga dijelaskan bahwa metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Metode tanya jawab adalah metode yang tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.⁹
- c. Metode Diskusi; yaitu suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui wahana tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh guna memecahkan suatu masalah. Dengan katha lain, dalam metode ini siswa mempelajari sesuatu melalui cara musyawarah di antara sesama mereka di bawah pimpinan atau bimbingan guru. Hal ini perlu bagi kehidupan kelak, bukan saja karena manusia senantiasa dihadapkan kepada berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan seorang diri, melainkan juga karena melalui kerja sama atau musyawarah mungkin diperoleh suatu pemecahan yang lebih baik.¹⁰

⁷ Syaiful Bahri Djamarah&Aswan Zain, **Strategi Belajar Mengajar**, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.97.

⁸ Abdul Rachman shaleh, **Pendidikan Agama dan Watak Bangsa**, (Jakarta: PT Raja Grafindo pers, 2005) hal. 197.

⁹ Syaiful Bahri Djamarah&Aswan Zain, **op.cit.**, hal. 94-95.

¹⁰ Abdul Rachman shaleh, **op.cit.**, hal.194-195.

- d. Metode Penugasan/Resitasi; yaitu metode dimana guru memberikan sejumlah tugas terhadap murid-muridnya untuk mempelajari sesuatu, kemudian mereka disuruh untuk mempertanggung jawabkannya. Tugas yang diberikan oleh guru bisa berbentuk memperbaiki, memperdalam, mengecek, mencari informasi, atau menghafal pelajaran. Metode ini mempunyai tiga fase, yaitu: fase pemberian tugas, fase pelaksanaan tugas, dan fase pertanggung jawaban tugas.¹¹
- e. Metode Latihan; yaitu merupakan suatu metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih melakukan suatu keterampilan tertentu berdasarkan penjelasan atau petunjuk guru. Ciri khas dari metode ini ialah kegiatan yang berupa pengulangan yang berkali-kali supaya asosiasi antara stimulus dan respon menjadi sangat kuat atau tidak mudah dilupakan. Dengan demikian terbentuklah keterampilan (pengetahuan siap) yang setiap saat siap untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan.¹²
- f. Metode Demonstrasi dan Eksperimen; Demonstrasi dan eksperimen merupakan dua jenis metode yang dalam pelaksanaannya sering dirangkainya. Artinya, setelah suatu demonstrasi kemudian diikuti eksperimen atau untuk melakukan eksperimen didahului dengan demonstrasi.¹³ Metode demonstrasi ini juga bisa disebut dengan metode praktis apabila masuk dalam penjelasan materi pengajaran Agama Islam. Guru mengajarkannya harus dengan mempergunakan cara-cara praktis, misal berkisar sekitar wudhu, shalat, tayamum, menyapu bagian atas peban luka dan lain-lain. Metode yang baik untuk mengajarkannya ialah membawa murid-murid ke mushala

¹¹ Basrudin M. Usman, **Metodologi Pembelajaran Agama Islam**, (Jakarta: Ciputat Press 2004), hal. 27.

¹² Abdul Rachman Shaleh, , **op.cit.**, hal. 203.

¹³ Abdul Rachman Shaleh, , **op.cit.**, hal.189.

sekolah untuk melatih mereka berwudhu dan shalat. Sebaiknya sebelum mereka dibawa ke mushala, terlebih dulu dijelaskan dengan sempurna secara teoretis (metode ceramah), kemudian guru memperagakannya di mushala (metode demonstrasi/praktis). Kemudian setiap murid dianjurkan untuk memperagakan (metode eksperimen).¹⁴

- g. Metode Sosiodrama; Sosiodrama atau role playing yaitu suatu metode mengajar dimana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu. Tujuannya adalah agar siswa menghayati dan menghargai perasaan orang lain, membagi tanggung jawab dalam kelompok, merangsang siswa berpikir dan memecahkan masalah.¹⁵
- h. Metode Cerita; ialah salah satu media pengajaran yang sukses. Ia merupakan satu cara Pendidikan yang disenangi anak-anak dan orang dewasa. Murid-murid pada setiap tingkatan umum menyukai cerita-cerita tertentu dan senang membacanya. Boleh jadi metode cerita tersebut merupakan suatu faktor Pendidikan yang penting untuk menumbuhkan sikap, mengubah nilai-nilai, menyeru kepada kebaikan, serta menghias diri dengan akhlak dan sifat-sifat yang mulia, karena cerita mempunyai daya kekuatan, pengaruh, dan bimbingan. Kenyataannya menunjukkan bahwa cerita mempunyai pengaruh yang dalam untuk mengadakan perubahan dan pengarahan, sebab khayalan orang yang mendengar cerita maupun yang membacanya akan mengikuti terus kejadian-kejadian dalam cerita itu dan menghayatinya. Guru pendidikan agama dapat menggunakan mata pelajaran sejarah, misalnya sejarah hidup Rasulullah dan sejarah para sahabat, dengan metode cerita.¹⁶

¹⁴ Muhammad Abdul Qadir Ahmad, **Metodologi Pengajaran Agama Islam**, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 65.

¹⁵ Armai Arief, , **op.cit.**, hal. 23.

¹⁶ Muhammad Abdul Qadir Ahmad, **op.cit.**, hal. 66-67.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif* (*descriptive research*) yaitu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel. Penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah sebagai berikut: perumusan masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan (apakah informasi kuantitatif ataukah kualitatif), menentukan prosedur pengumpulan data, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data, dan terakhir menarik kesimpulan penelitian.¹⁷

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Bogdan dan Taylor juga mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

Subyek penelitian ini adalah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam STAI Rakha Amuntai angkatan 2015 lokal/kelas A/5, B/6, dan C/7 semester IV yang menempuh mata kuliah Metodologi Pengajaran PAI. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data

¹⁷Trianto, ***Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga Kependidikan***, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 197-198.

¹⁸Lexi J. Moleong, ***Metode Penelitian Kualitatif***, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

dalam penelitian ini melalui tiga tahapan pengerjaan yaitu data reduction (reduksi data/pengumpulan data), data display (penyajian data), dan data conclusion (penarikan kesimpulan).

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu pengamatan langsung terhadap penampilan mahasiswa yang saat itu sedang mempraktikkan sejumlah metode pengajaran PAI dalam kegiatan praktik mengajar. Diberitahukan bahwa tingkatan pendidikan dalam kegiatan praktik penggunaan metode mengajar disini difokuskan pada jenjang Tsanawiyah. Maka metode pengajaran PAI yang telah digunakan oleh mahasiswa ketika praktik mengajar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak. Metode yang digunakan oleh mahasiswa tersebut sebagai berikut; ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas/resitasi, kerja kelompok, dan bercerita.
2. Mata Pelajaran Alquran Hadist. Metode yang digunakan oleh mahasiswa tersebut sebagai berikut; ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas/resitasi, kerja kelompok, latihan/drill, dan demonstrasi.
3. Mata Pelajaran Fiqh. Metode yang digunakan oleh mahasiswa tersebut sebagai berikut; ceramah, tanya jawab, pemberian tugas/resitasi, latihan, dan demonstrasi.
4. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Metode yang digunakan oleh mahasiswa tersebut sebagai berikut; ceramah, tanya jawab, pemberian tugas/resitasi, dan bercerita.

Semua metode yang telah digunakan oleh mahasiswa di atas memang sesuai dan cocok digunakan untuk materi-materi Pendidikan agama Islam. Dan mereka juga berhasil mengombinasikan beberapa metode sekaligus dalam praktik mengajar ini, seperti metode ceramah-tanya jawab-tugas, atau ceramah-diskusi-tugas, bisa juga ceramah-demonstrasi-eksperimen, dan lain-lain. Karena dalam praktiknya, metode mengajar tidak digunakan sendiri-sendiri, tetapi merupakan

kombinasi dari beberapa metode mengajar tersebut.

Di sini peneliti akan menggambarkan bagaimana salah satu mahasiswa di atas mempraktikkan metode tersebut.

1. Nama Mahasiswi: Misna/15.11.04.0101.06444, lokal B/6, mata pelajaran: Aqidah Akhlak, tema: Akhlak Terpuji dalam Pergaulan Remaja, metode yang digunakan: ceramah dikombinasikan dengan tanya-jawab. Pertama-tama dia memaparkan penjelasan tentang karakteristik remaja dan menyebutkan contoh perilaku akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kemudian baru proses tanya-jawab, guru memberikan pertanyaan kepada siswanya serta guru mempersilahkan siswanya untuk bertanya terkait pelajaran kepada gurunya dan terakhir guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pelajaran yang telah disampaikan.
2. Nama mahasiswa: Humaidi/15.11.04.0101.06373, lokal A/5, mata pelajaran: Alquran Hadist, tema: Belajar Bacaan Qalqalah dalam Al-Qur'an, metode yang digunakan: ceramah, tanya-jawab, demonstrasi, dan latihan. Awalnya dia menjelaskan apa itu qalqalah, macam-macam qalqalah, dan mencontohkan/mendemosntrasikan bagaimana bacaan qalqalah tersebut khusus pada ayat-ayat Alquran yang mengandung bacaan qalqalah. Kemudian siswa-siswanya diminta untuk latihan membaca ayat Alquran yang mengandung bacaan qalqalah.
3. Nama mahasiswi: Ayu Utari/15.11.04.0101.06411, lokal B/6, mata pelajaran: Fiqh, tema:Sujud Syukur, metode yang digunakan: ceramah, tanya-jawab, latihan, dan tugas. Pertama-tama dia memaparkan apa itu sujud syukur, sebab harus melakukan sujud syukur, dan mempraktikkan bagaimana sujud syukur tersebut, kemudian tanya-jawab diseputar sujud syukur, setelah itu siswa latihan melakukan sujud syukur, terakhir siswa diberi tugas.
4. Nama mahasiswa: Rusida/15.11.04.0101.06484, lokal C/7, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, tema: Mengenal sejarah Nabi Muhammad Saw periode mekkah, metode yang

digunakan: ceramah, tanya-jawab, cerita, penugasan. Pertama-tama dia memaparkan bagaimana keadaan Mekkah sebelum Islam masuk, kemudian diselingi dengan tanya-jawab, setelah itu dia bercerita tentang hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu bercerita tentang Abu Lahab yang tidak lain adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri yang mana paman beliau ini selalu mencela dan menghambat dakwah beliau, selanjutnya pemberian tugas.

Demikian gambaran singkat hasil penelitian yang mengangkat judul **“Praktik Penggunaan Metode Mengajar Oleh Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAI Rakha Amuntai”**. Semoga bermanfaat untuk pengembangan mata kuliah Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam selanjutnya.

F. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang *“Praktik Penggunaan Metode Mengajar Oleh Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAI Rakha Amuntai”*, Maka pada kali ini peneliti akan mengambil kesimpulan dari penelitian ini:

Metode yang digunakan dan dipraktikkan oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di STAI Rakha Amuntai, angkatan 2015 lokal/kelas A/5, B/6, dan C/7 semester IV yang menempuh mata kuliah Metodologi Pengajaran PAI, adalah sebagai berikut; ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas/resitasi, kerja kelompok, latihan, demonstrasi, dan bercerita. dan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan mahasiswa mempraktikkan metode-metode pengajaran PAI ini bisa dikategorikan telah berhasil dengan baik dalam mempraktikkan metode pengajaran PAI.

G. Saran

1. Untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di STAI Rakha Amuntai agar lebih kreatif lagi menggunakan metode-metode pengajaran. Karena masih banyak metode-metode pengajaran yang bisa digunakan seperti metode sosiodrama/role playing yang sangat cocok digunakan untuk pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan Aqidah Akhlak. Dan untuk metode cerita ini tidak harus selalu gurunya yang bercerita jadi cerita dari siswanya juga perlu agar siswa dilatih untuk lebih aktif.
2. Untuk perpustakaan STAI Rakha Amuntai agar lebih memperbanyak referensi buku yang berkaitan dengan metodologi pengajaran PAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Ahmad, Muhammad. 2008. **Metodologi Pengajaran Agama Islam**. Jakarta. Rineka Cipta.
- Arief, Armai. 2002. **Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam**. Jakarta. Ciputat Press.
- Bahri Djamarah, Syaiful & Aswan Zain. 2010. **Strategi Belajar Mengajar**. Jakarta. Rineka Cipta.
- J. Moleong, Lexi. 2000. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Ladjud, Hafni. 2005. **Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi**. Jakarta. Quantum Teaching.
- M. Usman, Basrudin. 2004. **Metodologi Pembelajaran Agama Islam**. Jakarta. Ciputat Press.
- Rachman shaleh, Abdul. 2005. **Pendidikan Agama dan Watak Bangsa**. Jakarta. PT Raja Grafindo pers.
- Saebani, Ahmad. 2009. **Ilmu pendidikan Islam**. Bandung. Pustaka Setia.
- Sanjaya, Wina. 2006. **Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan**. Jakarta. Kencana–Prenadamedia.
- Tafsir, Ahmad. 2013. **Metodologi Pengajaran Agama Islam**. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Trianto. 2010. **Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga Kependidikan**. Jakarta. Kencana.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 pasal 1. Jakarta. Sinar Grafik.

FILSAFAT HERMENEUTIKA
(Wawasan Dan Kembali Ke Mitos)

Ramlan Thalib^{*}

Abstrak:

Kata hermeneutika yang diambil dari peran Hermes adalah sebuah ilmu dan seni menginterpretasikan sebuah teks umum, maupun khusus (kitab suci). Inti persoalannya terletak pada pencarian makna teks, yang dikehendaki oleh penggagas. Makna hermeneutika berubah menjadi metodologi filsafat, dan sungguh pelajaran inti dari filsafat hermeneutika yang diajarkan kepada kita ketika memasuki abad kedua puluh satu sepertinya adalah bahwa kebenaran dapat ditangkap hanya selama mengakui mitos.

Kata Kunci:

Hermeneutika, metodologi, mitos.

^{*} Penulis adalah Dosen STAI Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai.

A. Pendahuluan

Ada dua gerakan berlawanan yang mendominasi sebagian besar filsafat Barat pada abad kedua puluh, yaitu versi analisis linguistik yang menekankan pentingnya analisis dan kebanyakan versi eksistensialisme sentetis yang hampir mengabaikan atau bahkan secara terang-terangan menolak makna penting kecen-derungan lawannya. Sekalipun begitu dengan adanya pertalian komplementer antara analisis dan sentetis, setiap kecenderungan tersebut saling bergantung demi melanjutkan keberadaan masing-masing, karena merupakan kutub-kutub yang komplementer pada sebuah gerakan. Oleh karena itu, tidaklah sampai mengejutkan ketika didapati menjelang akhir abad itu, kedua kecenderungan tersebut mulai sama-sama gugur dan diganti secara bertahap oleh cara pikir lain yakni filsafat hermeneutik. Ketiga pendekatan utama terhadap filsafat tersebut semuanya menekankan tema umum sentralitas bahasa pada pencarian filosofis. Bahasa memainkan peranan penting yang dapat dibandingkan dengan *being* (ada) dalam filsafat klasik dulu, karena terdapat kemiripan tertentu, yaitu keduanya bersifat universal. *Being* adalah universal dari sudut objektif: “ada” meliputi segala sesuatu; apa saja merupakan *being*. Sedangkan bahasa adalah universal dari sudut subjektif: bahasa meliputi segala sesuatu yang dikatakan dan diungkapkan, makna atau arti hanya timbul dalam hubungan dengan bahasa.

Bahasa adalah tema yang dominan dalam filsafat Eropa kontinental maupun filsafat Inggris dan Amerika, di mana-mana dapat kita saksikan the *linguistic turn*, dimana-mana refleksi filosofis berbalik kepada bahasa. Tidak sedikit aliran mengambil bahasa sebagai pokok pembicaraan yang hampir eksklusif, seperti misalnya hermeneutika, strukturalisme, semiotika, dan filsafat analitis.¹

Selama abad ke 18 dan terutama abad ke 19, secara bertahap Hermeneutika berkembang menjadi bidang bahan telaah akademik, terutama bagi para teolog, lantaran kebermaknaannya dalam membantu

¹ K. Bertens, ***Panorama Filsafat Modern***, (Cet. I; Jakarta: Penerbit Teraju, 2005), hal. 167-168.

penafsiran biblical.²

Dalam tulisan ini akan disampaikan tentang filsafat hermeneutika yang merupakan sebuah wawasan dan kembali kepada mitos.

B. Mitos dan Pelakunya

Bagaimana mitos berfungsi dalam masyarakat primitif, Mircea Eliade salah seorang cendekiawan abad ke 20 yang paling berpengaruh dalam studi agama secara ilmiah, makna yang ia rujuk pada kata “mitos” ia mendefinisikan mitos sebagai suatu cerita lama tentang asal usul dunia atau benda-benda di dunia dengan berbagai jalan menjelaskan mengapa keberadaan manusia begitu adanya, atau mengapa norma-norma budaya masyarakat berkembang sedemikian rupa. Mitos Prometheus, misalnya memberitahu kita tentang asal usul api disamping hal-hal lainnya. Subjek-subjek mitos yang paling umum diantaranya adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan seksualitas, hubungan keluarga dan kematian.

Adapun pelaku dalam mitos itu biasanya Dewa, sesuatu yang adikodrati, atau pahlawan dengan kekuatan yang adikodrati. Namun bagaimanapun, dalam seabad ini sudah ada upaya untuk memperlihatkan bahwa mitos-mitos kuno itu mengisahkan riwayat, berbicara tentang manusia.³

Dalam metodologi Yunani kuno, tampaknya ada seorang tokoh yang tampaknya sering menonjol di tengah-tengah yang lain lantaran jauh lebih simbolis daripada yang lain dalam membantu kita memahami hakikat dan makna logika. Dialah Hermes, putra “haram” dari Zeus dan Maya, putri tertua dari “Pleiades” (tujuh bersaudara, putri Atlas dan Pleione). Maya melahirkan dia sewaktu bersembunyi di gua, namun setelah tumbuh hampir mendekati ukuran anak kecil, ia menyelinap pada

² Stephen Palmquist, *The Tree of Philosophy*, A Course of Introduction Lecture for Beginning Student of Philosophy, By Philosophy Press Hongkong, 2000 (diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq, S.AG), hal. 135.

³ *Ibid*, hal. 20.

suatu malam mencuri 50 lembu Apollo, dan menyembunyikan di gua lain. Untuk mengecoh para pengejar, ia menutupi jejak kuku kaki lembu-lembu itu dan membuat jejak lain dengan sepatu pahatan, sehingga jejak-jejak itu terlihat menuju arah yang berlawanan. Di Gua itu ia menemukan api, lalu menyembelih dua ekor lembu menjadi 12 potong dan mempersembahkannya kepada Dewa-Dewa masing-masing sepotong. Dengan menggunakan kulit kura-kura dan kulit dua lembu tersebut ia membuat lyre pertama. Tatkala akhirnya Apollo menemukan tempat persembunyian itu ia sangat terpesona oleh suara kecapi Hermes sehingga ia menyerahkan seluruh ternak tersebut sebagai tukaran alat musik itu dan keduanya menjadi teman baik. Untuk menenangkan diri dengan musik seraya menggembala lembu, Hermes membuat seruling gembala dan mulai mempelajari seni nujum yang terlarang. Akhirnya Zeus menjadi sangat terkesan akan keterampilan nujum Hermes sehingga ia mengangkat dia menjadi utusan dari Dewa-Dewa abadi. Salah satu tugas utamanya adalah member mimpi kepada yang fana.⁴

Oleh karena itu, aliran filsafat hermeneutika pada abad ke 20 meminjam namanya dengan alasan yang baik mengingat sifat mitologis ini sebagaimana tugas Hermes adalah mengungkap makna-makna yang tersembunyi dari Dewa-Dewa ke manusia-manusia. Filsafat Hermeneutik pun berusaha memahami persoalan paling dasar dalam kajian umum tentang logika atau filsafat bahasa.

Dalam masyarakat Yunani tidak terdapat suatu agama tertentu, tapi mereka percaya pada Tuhan dalam bentuk mitologi. Sebenarnya dalam mitologi Yunani terdapat dewa-dewi yang dikepalai oleh Dewa Zeus dan Maia yang mempunyai anak bernama Hermes. Hermes dipercayai sebagai utusan para dewa untuk menjelaskan pesan-pesan para dewa di langit. Dari nama Hermes inilah konsep *hermeneutic* kemudian digunakan.⁵ Kata hermeneutika yang diambil dari peran

⁴ *Ibid*, hal. 134.

⁵ Hamid Fahmy Zarkasyi, ***Hermeneutika Sebagai Produk Pandangan Hidup***, dalam Kumpulan Makalah Workshop Pemikiran Islam Kontemporer, IKPM cabang Kairo, 2006), hal. 1.

Hermes adalah sebuah ilmu dan seni menginterpretasikan sebuah teks.

Hermes diyakini oleh Manichaeisme sebagai Nabi dalam mitologi Yunani, Hermes yang diyakini sebagai anak dewa Zeus dan Maia bertugas menyampaikan dan menginterpretasikan pesan-pesan dewa di gunung Olympus ke dalam bahasa yang dipahami manusia. Hermes mempunyai kaki bersayap dan dikenal dengan Mercurius dalam bahasa Latin. Menurut Abed al-Jabiri dalam bukunya *Takwīn al-‘Aql al-‘Ārabi*, dalam mitologi Mesir kuno, Hermes/Thoth adalah sekretaris Tuhan atau orisin Tuhan yang telah menulis disiplin kedokteran, sihir, astrologi dan geometri.⁶ Hermes yang dikenal oleh orang Arab sebagai Idris as, disebut Enoch oleh orang Yahudi.⁷ Baik Idris as, Hermes, Thoth, dan Enoch adalah merupakan orang yang sama.

C. Pengertian Hermeneutika

Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja *hermēneuein* (menafsirkan) atau kata benda *hermēneia* (interpretasi).⁸ Al-Farabi mengartikannya dengan lafal Arab *al-‘ibāroh* (ungkapan).⁹ Kata Yunani *hermeios* mengacu kepada seorang pendeta bijak Delphic. Kata *hermeios* dan kata kerja *hermēneuein* dan kata benda *hermēneia* biasanya dihubung-hubungkan dengan Dewa Hermes, dari situlah kata itu berasal. Hermes diasosiasikan dengan fungsi

⁶[Http://irwanmasduqi83.blogspot.com/2008/09/kritik – proyek – kritik – nalar – arab – abed al.html](http://irwanmasduqi83.blogspot.com/2008/09/kritik-proyek-kritik-nalar-arab-abed-al.html).

⁷ [Http://khidr.org/gunawardhana.htm](http://khidr.org/gunawardhana.htm).

⁸ Richard E. Palmer, *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* diterjemahkan oleh Masnuri Hery dan Damanhuri dengan judul *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, *Hermeneutics ...*, hal. 14.

⁹[Http://peperonity.com/go/sites/mview/assunnah.karya.indo1/15293598/ Hermeneutika dan Bahayanya](http://peperonity.com/go/sites/mview/assunnah.karya.indo1/15293598/Hermeneutika%20dan%20Bahayanya).

transmisi apa yang ada di balik pemahaman manusia ke dalam bentuk apa yang dapat ditangkap oleh intelegensia manusia.¹⁰ Kurang lebih sama dengan Hermes, seperti itu pulalah karakter dari metode hermeneutika.

Menelusuri akar kata paling awal dalam Yunani, orisinalitas kata modern dari “hermeneutika” dan “hermeneutis” mengasumsikan proses “membawa sesuatu untuk dipahami”, terutama seperti proses ini melibatkan bahasa, karena bahasa merupakan mediasi paling sempurna dalam proses.

Mediasi dan proses membawa pesan “agar dipahami” yang diasosiasikan dengan Hermes ini terkandung di dalam tiga bentuk makna dasar dari *hermēneuein* dan *hermēneia* dalam penggunaan aslinya. Tiga bentuk ini menggunakan bentuk kata kerja dari *hermēneuein*, yaitu: (1) mengungkapkan kata-kata, misalnya “to say”; (2) menjelaskan; (3) menerjemahkan. Ketiga makna itu bisa diwakilkan dalam bentuk kata kerja bahasa Inggris, “to interpret”. Tetapi masing-masing ketiga makna itu membentuk sebuah makna independen dan signifikan bagi interpretasi.

Sebagai turunan dari simbol dewa, hermeneutika berarti suatu ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata atau suatu kejadian pada waktu dan budaya yang lalu dapat dimengerti dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam situasi sekarang. Dengan kata lain, hermeneutika merupakan teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap sebuah Teks.¹¹

Dalam *Webster’s Third New International Dictionary* dijelaskan definisinya, yaitu “studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi; khususnya studi tentang prinsip-prinsip umum interpretasi Bibel.” Setidaknya ada tiga bidang yang sering akrab dengan

¹⁰ Richard E. Palmer, *op.cit.*, hal. 15.

¹¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika/Studi_Hermeneutika_dan_Penerapannya](http://id.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika/Studi_Hermeneutika_dan_Penerapannya).

term hermeneutika: teologi, filsafat, dan sastra.¹²

Persoalan utama hermeneutika terletak pada pencarian makna teks, apakah makna objektif atau makna subjektif. Perbedaan penekanan pencarian makna pada ketiga unsur hermeneutika: penggagas, teks dan pembaca, menjadi titik beda masing-masing hermeneutika. Titik beda itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori hermeneutika: hermeneutika teoritis, hermeneutika filosofis, dan hermeneutika kritis. *Pertama*, hermeneutika teoritis. Bentuk hermeneutika seperti ini menitikberatkan kajiannya pada problem “pemahaman”, yakni bagaimana memahami dengan benar.

Makna yang menjadi tujuan pencarian dalam hermeneutika ini adalah makna yang dikehendaki penggagas teks. *Kedua*, hermeneutika filosofis. Problem utama hermeneutika ini bukanlah bagaimana memahami teks dengan benar dan obyektif sebagaimana hermeneutika teoritis. Problem utamanya adalah bagaimana “tindakan memahami” itu sendiri. *Ketiga*, hermeneutika kritis. Hermeneutika ini bertujuan untuk mengungkap kepentingan di balik teks. Hermeneutika kritis menempatkan sesuatu yang berada di luar teks sebagai problem hermeneutiknya.

Ilmu hermeneutika dalam disiplin filsafat bahasannya bertumpu pada persoalan intensitas pemahaman terhadap teks-teks apa saja secara umum maupun *teks-teks suci* (al-Qur’an, Taurat, dan Injil) secara khusus.

Filsafat hermeneutika sebagai metode kefilosofan adalah selalu relevan, sebab kebenaran yang diperolehnya tergantung pada orang yang melakukan interpretasi. “Dogma-dogma” hermeneutis juga luwes dan “*open ended*” serta mengikuti perkembangan waktu.¹³

Teori yang menyebutkan bahwa hermeneutika berasal dari kata *Hermes*, nama tokoh dalam mitologi Yunani yang menjadi penghubung

¹² [Http://idhimakalah.wordpress.com/2007/11/22/hermeneutika-ontologi-eksistensial-heidegger](http://idhimakalah.wordpress.com/2007/11/22/hermeneutika-ontologi-eksistensial-heidegger).

¹³ E.Sumaryono, “Kesimpulan” ***Dalam Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat***, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 136.

antara Dewa Zeus dan manusia dalam menjelaskan bahasa dewa agar bisa dipahami oleh manusia. Dan berkat kepiawaian Hermes menerjemahkan bahasa Zeus akhirnya bahasa-nya menjadi teks suci.¹⁴

Keterkaitannya dengan teks suci, hermeneutika memiliki kandungan arti bahwa titik bahasan tentang relasi penafsir dan teks itu bukan hanya diskursus dalam pemikiran Barat, akan tetapi diskursus yang wujudnya juga ada dalam tradisi Arab baik Arab lama maupun sekarang.¹⁵

Istilah hermeneutika sebenarnya merupakan istilah klasik yang pertama kali digunakan dalam wilayah studi teologis untuk menunjuk pada sejumlah kaidah dan kriteria yang harus diikuti penafsir untuk memahami teks keagamaan (kitab suci).

Dengan pengertian semacam ini, hermeneutika berbeda dengan tafsir yang didenotasi oleh istilah *exegeses* dengan asumsi bahwa tafsir (*exegeses*) itu menunjuk penafsiran itu sendiri dengan detail-detail aplikasinya, sementara hermeneutika mengacu pada teori penafsiran.

Pengertian istilah ini meluas dalam berbagai aplikasi modern dan bergeser dari wilayah disiplin teologis ke wilayah yang jauh lebih luas, mencakup umumnya ilmu humaniora, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, estetika, dan kritik sastra.¹⁶

D. Tokoh-Tokoh Filsafat Hermeneutika

Dalam buku *Hermeneutika Sebagai Produk Pandangan Hidup* oleh Hamid Fahmy Zarkasyi disebutkan ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap timbulnya hermeneutika sebagai suatu ilmu atau teori interpretasi, yaitu:

¹⁴ Baedhowi, ***Humanisme Islam, Kajian terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 191.

¹⁵ Nashr Hamid Abu Zaid, ***Hermeneutika Inklusif, Mengatasi Problema Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan Atas Dirkursus Keagamaan***, (Jakarta: ICIP, 2004), hal. ix.

¹⁶ ***Ibid.***, hal. 4.

Pertama, Masyarakat yang terpengaruh oleh pemikiran Yunani, *kedua* kondisi masyarakat Yahudi dan Kristen yang menghadapi masalah teks kitab “suci” agama mereka dan berupaya mencari model yang cocok untuk diinterpretasikan, *ketiga*, masyarakat Eropa di zaman Pencerahan (*Enlightenment*) berusaha lepas dari tradisi dan otoritas keagamaan dan membawa hermeneutika keluar konteks keagamaan.¹⁷

Adapun tokoh-tokoh filsafat Hermeneutika antara lain adalah:

1. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834).

Schleiermacher menjadikan persoalan hermeneutis sebagai persoalan universal dan mengajukan teori pemahaman yang filosofis untuk mengatasinya. Ia merubah maka hermeneutika dari sekedar kajian teks Bibel menjadi metode memahami dalam pengertian filsafat.

Pandangan Schleiermacher, tradisi hermeneutika filologis (Hermeneutika yang berkuat dengan teks-teks dari Yunani–Romawi) dan hermeneutika teologis (Hermeneutika yang terfokus pada teks-teks kitab suci) bisa berinteraksi, yang membuka kemungkinan untuk mengembangkan teori umum mengenai pemahaman dan penafsiran. Paul Ricoeur berpendapat hermeneutika lahir dengan usaha untuk menaikkan penafsiran Bibel dan filologis ke tingkat ilmiah, yang tidak terbatas kepada metode yang khusus, dengan mensubordinasikan kaidah–kaidah dalam tafsir Bibel dan filologis kepada problem penafsiran yang umum, maka teori penafsiran.

Schleiermacher disebut juga dengan hermeneutika universal (*universal hermeneutics*).¹⁸ Schleiermacher telah menumbuhkan asas seni pemahaman teks; pemahaman yang selalu terkait mengikuti perkembangan dari setiap orang dan dari satu zaman ke zaman yang lain. Jarak pemisah antara zaman produksi teks dengan zaman pemahaman kekinian sedemikian meluas dan membentang, sehingga diperlukan ilmu yang mencegah kekeliruan pemahaman. Atas dasar itu,

¹⁷ Hamid Fahmy Zarkasyi, *op.cit*, hal. 2.

¹⁸ Adnin Armas, ***Dampak Hermeneutika Schleiermacher dan Dilthey terhadap Studi Al-Qurán***, Jurnal Islamia, Vol. III, No. 3, 2008, hal. 39.

Schleiermacher meletakkan kaidah pemahaman teks yang terbatas pada dua aspek utama yaitu: aspek kebahasaan (penafsiran tata bahasa) dan aspek kemampuan menembus karakter psikis pengarang. Kedua aspek itu saling melengkapi satu dengan lainnya, maka Schleiermacher menyimpulkan seseorang penafsir akan bisa memahami teks sebaik atau bahkan lebih baik daripada pengarangnya sendiri, dan memahami pengarang teks tersebut lebih baik daripada pengarang sendiri.¹⁹

2. Wilhelm Dilthey (1833–1911)

Dilthey pada bagian awal pemikirannya, berusaha membumikan kritiknya ke dalam sebuah transformasi psikologis. Namun karena psikologi bukan merupakan disiplin historis, usaha-usahnya ia hentikan.²⁰ Ia menolak asumsi Schleiermacher bahwa setiap kerja pengarang bersumber dari prinsip-prinsip yang implisit dalam pikiran pengarang. Ia anggap asumsi ini anti-historis sebab ia tidak mempertimbangkan pengaruh eksternal dalam perkembangan pikiran pengarang. Selain itu, Dilthey juga mencoba mengangkat hermeneutika menjadi suatu disiplin ilmu yang memisahkan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam dan mengembangkannya menjadi metode-metode dan aturan-aturan yang menentukan objektivitas dan validitas setiap ilmu. Bagi Dilthey hermeneutika universal memerlukan prinsip-prinsip epistemologi yang mendukung pengembangan ilmu-ilmu sosial.²¹

Menurutnya, dalam tindakan pemahaman historis, yang harus berperan adalah pengetahuan pribadi mengenai apa yang dimaksudkan manusia. Jika Kant menulis *Critique of Pure Reason*, ia mencurahkan pemikiran untuk gagasan *Critique of Historical Reason*.²²

Dilthey menjadikan hermeneutika sebagai komponen utama bagi fondasi ilmu humaniora (*Geisteswissenschaften*). Ambisi ini

¹⁹ *Ibid*, hal. 74.

²⁰ *Ibid*, hal. 46.

²¹ Hamid Fahmy Zarkasyi, *op.cit.*, hal. 8.

²² [Http://id.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika/Studi](http://id.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika/Studi)

menyebabkan Dilthey telah meluaskan penggunaan hermeneutika ke dalam segala disiplin ilmu humaniora. Jadi, dalam pandangan Dilthey, teori hermeneutika telah berada jauh di atas persoalan bahasa.²³

3. Martin Heidegger (1889–1976)

Heidegger mengembangkan hermeneutika sebagai interpretasi yang berdimensi ontologis. Pandangan Heidegger, pemahaman (*verstehen*) bukanlah sebuah metode. Menurutnya pemahaman lebih dari sekedar metode. Sebabnya pemahaman telah wujud terlebih dahulu (*pre-reflective understanding*) sebelum merefleksikan sesuatu. Heidegger menamakan pra-pemahaman tersebut sebagai *Dasein*, yang secara harfiah berarti disana-wujud.²⁴

Apa yang ditulis Heidegger sebagai hermeneutika tidak bisa dipahami dalam pengertian pemahaman yang subjektif. Hermeneutika juga bukan hanya sebuah metode pengungkapan realitas. Hermeneutika adalah hakikat keberadaan manusia yang menyingkap selubung Ada (*Sein*). Ia tidak berada dalam pengertian subjek-objek, di mana pemahaman tentang objek berangkat dari persepsi kategoris dalam diri subjek. Subjek tidak memahami sejauh objek tidak mengungkapkan diri. Subjek tergantung kepada pengungkapan objek. Sebetulnya term subjek dan objek di sini tidak tepat, sebab *Dasein* adalah *seinde* yang memiliki kemampuan yang lain, Dikatakan *Dasein* karena cara beradanya berbeda dengan benda-benda lain (*seinde*) yang ada begitu saja. *Dasein* berarti mengada di sana. Terdapat nuansa aktifitas dari *Dasein*. *Dasein* adalah satu-satunya *seinde* yang secara ontologis mampu keluar dari dirinya sendiri (*Existenz*) guna menguak adanya sendiri dan adanya *seinde* yang lain.²⁵

Heidegger mencoba memahami teks dengan metode eksistensial. Ia menganggap teks sebagai suatu “ketegangan” dan “tarik-menarik” antara kejelasan dan ketertutupan, antara ada dan tidak ada.

²³ [Http://idhimakalah.wordpress.com](http://idhimakalah.wordpress.com), **loc.cit.**

²⁴ Richard E. Palmer, **loc.cit.**

²⁵ [Http://idhimakalah.wordpress.com](http://idhimakalah.wordpress.com)

Eksistensi, menurutnya, bukanlah eksistensi yang terbagi antara wujud transendent dan horisontal. Semakin dalam kesadaran manusia terhadap eksistensinya, maka sedalam itu pula pemahamannya atas teks; karena itu, teks tidak lagi mengungkapkan pengalaman historis yang terkait dengan suatu peristiwa. Pengalaman eksistensialnya itulah manusia bisa meresapi wujudnya dan cara dia bereksistensi sebagai unsur penegas dalam proses memahami suatu teks.²⁶

Heidegger mencoba memberikan pengertian lain kepada bahasa dan tidak hanya berkuat pada pengertian bahasa sebagai alat komunikasi saja. Bahasa merupakan artikulasi eksistensial pemahaman. Bahasa kemudian juga bermakna ontologis. Antara keberadaan, kemunculan, dan bahasa, saling mengandalkan. Bersama pikiran, bahasa adalah juga ciri keberadaan manusia. Dalam bahasa, ada mengejawantah. Oleh karenanya, interpretasi merupakan kegiatan membantu terlaksananya peristiwa bahasa, karena teks mempunyai fungsi hermeneutik sebagai tempat pengejawantahan Ada itu sendiri.²⁷

Hermeneutika Heidegger telah mengubah konteks dan konsepsi lama tentang hermeneutika yang berpusat pada analisa filologi interpretasi teks. Heidegger tidak berbicara pada skema subjek-objek, klaim objektivitas, melainkan melampaui itu semua dengan mengangkat hermeneutika pada tataran ontologis.

4. Hans-Georg Gadamer (1900-1998)

Gadamer menegaskan bahwa pemahaman adalah persoalan ontologis. Ia tidak menganggap hermeneutika sebagai metode, sebab baginya pemahaman yang benar adalah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis bukan metodologis. Artinya kebenaran dapat dicapai bukan melalui metode tapi melalui dialektika, dimana lebih banyak pertanyaan dapat diajukan, dan ini disebut filsafat praktis.²⁸

²⁶ Henry Salahuddin, **Studi Analitis Kritis Terhadap Filsafat Hermeneutik Alquran**, dalam Blog pada WordPress.com

²⁷ <http://idhimakalah.wordpress.com>

²⁸ Adnin Armas, **Dampak Hermeneutika Schleiermacher dan Dilthey terhadap Studi Al-Qurán**, Jurnal Islamia, Vol. III, No. 3, 2008, hal.

Gadamer melontarkan konsep “pengalaman” historis dan dialektis, di mana pengetahuan bukan merupakan bias persepsi semata tetapi merupakan kejadian, peristiwa, perjumpaan.²⁹

Gadamer menegaskan makna bukanlah dihasilkan oleh interioritas individu tetapi dari wawasan-wawasan sejarah yang saling terkait yang mengkondisikan pengalaman individu. Gadamer mempertahankan dimensi sejarah hidup pembaca.³⁰

Filsafat hermeneutika Gadamer meniscayakan wujud kita berpijak pada asas hermeneutis, dan hermeneutika berpijak pada asas eksistensial manusia. Ia menolak segala bentuk kepastian dan meneruskan eksistensialisme Heidegger dengan titik tekan logika dialektik antara aku (pembaca) dan teks/karya. Dialektika itu mesti dipahami secara eksistensial, karena hakikatnya memahami teks itu sama dengan pemahaman kita atas diri dan wujud kita sendiri. Saat kita membaca suatu karya agung, ketika itu kita lantas menghadirkan pengalaman-pengalaman hidup kita di masa silam, sehingga melahirkan keseimbangan pemahaman atas diri kita sendiri. Proses dialektika memahami karya seni berdiri atas asas pertanyaan yang diajukan karya itu kepada kita; pertanyaan yang menjadi sebab karya itu ada.³¹

Gadamer umpamakan pemahaman manusia sebagai interpretasi teks, dalam proses memahami teks selalu didahului oleh pra-pemahaman sang pembaca dan kepentingannya untuk berpartisipasi dalam makna teks. Kita mendekati teks selalu dengan seperangkat pertanyaan atau dengan potensi kandungan makna dalam teks. Melalui horizon ekspektasi inilah kita memasuki proses pemahaman yang terkondisikan oleh realitas sejarah. Hermeneutika dalam pengertian Gadamer adalah interpretasi teks sesuai dengan konteks ruang dan waktu interpreter. Inilah yang ia sebut dengan *effective historical*

4.

²⁹ Richard E. Palmer, *op.cit*, hal. 231-232.

³⁰ Adnin Armas, *op.cit*, hal. 76.

³¹ Henry Salahuddin, *loc.cit*.

consciousness yang struktur utamanya adalah bahasa.³²

Menurut Gadamer, pemahaman bukanlah salah satu daya psikologis yang dimiliki manusia, namun pemahaman adalah kita. Oleh sebab itu, ilmu tanpa pra-duga adalah tidak terjadi. Kita gagal memahami *hermeneutic circle*, jika kita berusaha keluar dari lingkaran tersebut. Menurut Gadamer, ketika kita berusaha memahami sebuah teks kita akan berhadapan dengan koherensi relatif dari ruang lingkup makna. Jadi, sebenarnya ada dua metode yang perlu dihindari ketika memahami sesuatu, yaitu:

- a. Sikap reduktif ketika dengan seandainya memasukkan konsep kita sendiri dengan berlebih-lebihan ke dalam ruang lingkup budaya, sehingga menafikan kekhususan maknanya.
- b. Sikap *self-effacement* ketika kita menafikan kepentingan kita sendiri dengan berusaha masuk ke dalam kacamata orang lain. Kedua metode tersebut tidak menyelesaikan persoalan ilmu yang objektif karena masih terjerat dengan dikotomisasi antara subjek atau objek, padahal kondisi primordial kita melampaui hubungan antara subjek dan objek.³³

5. Jurgen Habermas (1929-)

Habermas sebagai penggagas hermeneutika kritis menempatkan sesuatu yang berada di luar teks sebagai problem hermeneutiknya. Sesuatu yang dimaksud adalah dimensi ideologis penafsir dan teks, sehingga dia mengandaikan teks bukan sebagai medium pemahaman, melainkan sebagai medium dominasi dan kekuasaan, dalam teks tersimpan kepentingan pengguna teks. Karena itu, selain horizon penafsir, teks harus ditempatkan dalam ranah yang harus dicurigai. Menurut Habermas, teks bukanlah media netral, melainkan media dominasi. Karena itu, ia harus selalu dicurigai.

Habermas menegaskan bahwa pemahaman didahului oleh kepentingan. Yang menentukan horizon pemahaman adalah kepeni-

³² Hamid Fahmy Zarkasyi, *op.cit.*

³³ Adnin Armas, *op.cit.*, hal. 5.

ngan sosial (*social interest*) yang melibatkan kepentingan kekuasaan (*power interest*) sang interpreter.³⁴

6. Paul Ricoeur (1913–2005)

Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutika yang mengacu balik pada fokus eksegesis tekstual sebagai elemen distingtif dan sentral dalam hermeneutika. Hermeneutika adalah proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang nampak ke arah makna terpendam dan tersembunyi. Objek interpretasi, yaitu teks dalam pengertian yang luas, bisa berupa simbol dalam mimpi atau bahkan mitos-mitos dari simbol dalam masyarakat atau sastra. Hermeneutika harus terkait dengan teks simbolik yang memiliki multi makna (*multiple meaning*); ia dapat membentuk kesatuan semantik yang memiliki makna permukaan yang betul-betul koheren dan sekaligus mempunyai signifikansi lebih dalam. Hermeneutika adalah sistem di mana signifikansi mendalam diketahui di bawah kandungan yang nampak.³⁵

Konsep yang utama dalam pandangan Ricoeur adalah bahwa begitu makna objektif diekspresikan dari niat subjektif sang pengarang, maka berbagai interpretasi yang dapat diterima menjadi mungkin. Makna tidak diambil hanya menurut pandangan hidup (*worldview*) pengarang, tapi juga menurut pengertian pandangan hidup pembacanya.³⁶ Sederhananya, hermeneutika adalah ilmu penafsiran teks atau teori tafsir.

E. Kembali Ke Mitos

Gadamer, murid Heidegger, ialah seorang pendatang. Seperti Kant, ia hampir berusia senja tatkala ia menulis adikaryanya, *Truth and Method* (1960). Buku ini, yang kadang-kadang dijuluki “Kitab Suci” filsafat hermeneutik Jerman, memperkirakan perbedaan tajam historis antara periode filsafat Pencerahan dan Romantik. Filsafat Pencerahan

³⁴ H Hamid Fahmy Zarkasyi, *loc.cit.*

³⁵ Richard E. Palmer, *op.cit.*, hal. 47–48.

³⁶ Hamid Fahmy Zarkasyi, *loc.cit.*

berpegang pada pandangan yang naif bahwa akal dapat memecahkan semua masalah manusia, asalkan kita mau membuang semua praduga dan memandangi alam dari sudut pandang kebenaran universal yang objektif. Filsafat Romantik menolak “prasangka terhadap parasangka” ini, dan menggantinya dengan prasangka *demi* tradisi dan, bersama dengan ini, suatu penghormatan baru terhadap mitos. Jadi, para Romantik memandang alam dari sudut pandang kebenaran individual yang subjektif. Gadamer mengemukakan bahwa dengan sekadar mengatakan “tidak” terhadap sudut pandang lawan, gerakan ini melakukan kesalahan dasar yang sama dengan kesalahan Pencerahan: para filsuf di kedua tradisi tersebut cenderung tetap tak sadar akan prasangka mereka. Filsafat hermeneutik melampaui kedua gerakan itu dengan mengklaim bahwa memiliki *suatu* prasangka tidak terelakkan. Gadamer menyatakan, prasangka adalah buruk hanya bila merupakan hasil dari melihat bukti secara terlalu tergesa-gesa. Prasangka yang didasarkan pada *rasa percaya kepada otoritas yang sah* bukan hanya tidak buruk, melainkan juga merupakan langkah-niscaya dalam pemerolehan segala pengetahuan murni. Kuncinya adalah mengakui bahwa “otoritas” itu muncul bukan dari *posisi* orang, melainkan dari *pengetahuan* orang. Seseorang mematuhi orang lain dengan sukarela bukan melalui paksaan politis, melainkan melalui pengakuan bebas bahwa orang lain tersebut *mengetahui* apa yang ia bicarakan. Gadamer setuju bahwa tradisi merupakan sumber otoritas semacam itu yang seringkali paling andal; namun bila ini mengemukakan pengetahuan murni, kita harus dapat menyokongnya dengan akal juga. Seperti Kant pula, ia mengingatkan bahwa akal (yakni logika) belaka tidak selalu dapat dipercaya untuk mengarahkan kita menuju kebenaran.

Paradoks periode Romantik adalah bahwa, walau ini membangkitkan kesadaran historis manusia, periode ini lalai untuk mengakui bahwa keterbatasan kita, sebagai yang – berada dalam waktu, membatasi kemampuan kita untuk memahami sejarah kita sendiri dengan akurat. Pada jantung “masalah hermeneutik” “sejarah bukan milik kita, tetapi kita dimiliki olehnya”. Lantaran penafsir adalah *dalam* sejarah, proses penafsiran makna teks apa saja adalah tugas yang tanpa

akhir. Pemahaman mensyaratkan kita untuk mula-mula mengatasi “rasa asing” terhadap teks atau obyek yang dipikirkan, dan kita melakukan hal ini dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dikenal, sesuatu yang telah kita pahami. Inilah alasan mengapa prasangka merupakan bagian yang tak terelakkan dari proses pemahaman, dan mengapa *menyadari* prasangka kita sangat penting untuk penafsiran teks—atau sebetulnya segala segi pengalaman kita. Kesadaran bahwa penafsir berada di dalam rangkaian kesatuan historis yang sama tatkala menafsirkan apa saja adalah prinsip yang oleh Gadamer disebut “prinsip sejarah-efektif”.

Salah satu argumen pokok Gadamer dalam *Truth and Method* adalah bahwa “keyakinan naif akan metode ilmiah” “menyebabkan penyangkalan seseorang akan kesejarahannya sendiri”. Pada aktualnya, upaya *apa pun* untuk mendapatkan kebenaran harus didasarkan pada suatu metode; dan metode apa saja yang kita pilih itu secara paradoksis pasti membatasi pandangan kita tentang apa yang benar. Akan tetapi, metode *ilmiah* itu berbahaya khususnya dalam hal ini, para penganjur lantangnya cenderung memperlakukannya sebagai satu dan satu-satunya metode pencapaian kebenaran; namun dengan tetap bebal akan prasangka (atau “mitos” mereka sendiri, klaim-klaim semacam itu akhirnya *bersembunyi* sebanyak kebenaran yang mereka ungkap—kalau tidak lebih banyak. Sebaliknya, apresiasi filosofis terhadap prinsip sejarah – efektif memberi kita “kesadaran akan situasi hermeneutiknya”

“Situasi”, menurut Gadamer, adalah “sudut pandang yang membatasi kemungkinan pandangan”. Batas-batas situasi kita dinamai “horison” –istilah yang dipinjam oleh Gadamer dari Heidegger—kita. Yang penting dari penyadaran akan cakrawala pribadi kita sendiri ini adalah bahwa ini memberi kita rasa *mawas* (*perspective*) mengenai segala yang dapat kita lihat dari sudut pandang tertentu kita. Tanpa kesadaran semacam ini, orang cenderung peduli hanya terhadap kejadian yang terdekat dengan waktu sekarang. Filsafat hermeneutik memecahkan masalah ini dengan menyediakan rasa kesadaran historis – “horison masa lalu” – yang memungkinkan kita untuk memperluas cakrawala kita sehingga ini memasukkan situasi orang lain (orang yang

kata-katanya kita tafsirkan). Peleburan cakrawala-cakrawala ini terjadi bilamana kita tafsirkan kata-kata orang lain.

Dalam pengertian apakah kita dapat mengatakan bahwa filsafat hermeneutik, seperti yang tersaji oleh Gadamer dalam bentuknya yang paling lengkap dan sistematis, pada aktualnya mensintesis gerakan yang lebih awal, yakni analisis linguistik dan eksistensialisme? Salah satu dari banyak cara pembelaan klaim semacam ini akan mempertimbangkan bagaimana masing-masing cenderung memandang tugas berfilsafat. Para filsuf linguistik memandang sendiri bahwa mereka (idealnya) ialah analis ilmiah terhadap bentuk-bentuk bahasa yang obyektif, sedangkan para eksistensialis memandang sendiri bahwa mereka peramal yang menyeru manusia menuju penghargaan baru terhadap makna (atau kesia-siaan) *pengalaman* insani. Dengan menganggap bahwa filsafat pada dasarnya adalah *percakapan untuk ditafsirkan*, Gadamer menggabungkan bias analitik Wittgenstein dan bias sintetik Heidegger (seperti yang ditafsirkan oleh filsuf yang mengaku eksistensialis): filsafat adalah dan harus merupakan upaya, *baik* untuk menganalisis dan *memahami* bentuk-bentuk linguistik ekspresi *maupun* untuk mensintesis dan *mengalami* dorongan dan tarikan maknawi dari bentuk-bentuk tersebut ketika berkembang dalam komunitas – komunitas yang ditengahi – secara – historis. Sungguh, pelajaran inti yang diajarkan oleh filsafat hermeneutik kepada kita ketika kita memasuki abad kedua puluh satu adalah: bahwa kebenaran dapat “ditangkap” hanya selama kita mau mengakui *mitos* kita.³⁷

F. Kesimpulan

Kata hermeneutika yang diambil dari peran Hermes adalah sebuah ilmu dan seni menginterpretasikan sebuah teks umum, maupun khusus (kitab suci). Inti persoalannya terletak pada pencarian makna teks, yang dikehendaki oleh penggagas.

Sejarah perkembangan filsafat hermeutika: 1) dari mitologi

³⁷ Stephen Palmquist, *op.cit.*, hal. 137-138.

Yunani ke teologi Kristen: digunakan untuk kebutuhan kultural bagi menentukan makna, peran dan fungsi teks-teks kesusasteraan yang berasal dari masyarakat Yunani kuno, meski sudah dipraktikkan dalam tradisi Yunani. Metode hermeneutika alegoris kemudian ditransmisikan ke dalam pemikiran teologi Kristen. Terjadi karena teks Bible mulai digugat; 2) dari teologi dogmatis kepada spirit rasionalisme: hermeneutika terus menjadi diskursus. Ajaran gereja mengarahkan Bible pada kebenaran akal. Selanjutnya mulai ada peralihan dari teologi yang dogmatis kepada semangat rasionalisme sudah mulai nampak sejak terjadinya gerakan Reformasi Protestan pada abad ke-16. Hermeneutika mengalami perkembangan dan perhatian secara akademis, setelah dianggap sebuah perbedaan. Hermeneutika dianggap sekedar pengantar ilmu interpretasi menuju kepada metodologi; dan, 3) dari teologi protestan kepada filsafat: mulai berlaku modernitas pada abad 18, yaitu pemikiran rasional yang menjanjikan pembebasan dari irrasionalitas mitologi, agama dan khurafat. Gerakan desakralisasi menganggap ilmu diletakkan dalam posisi berlawanan dengan agama yang dianggap penyebab kemunduran. Sehingga muncul kritis Perjanjian Baru. Melahirkan banyak teks-teks tandingan terhadap *textus receptus* edisi Erasmus. Studi tersebut menyatakan bahwa Kalam Tuhan (*Word of God*) dan Kitab Suci (*Holy Scripture*) tidak identik, bagian-bagian dari Bibel bukanlah inspirasi dan tidak dapat diterima secara otoritatif, hal ini menyebabkan makna hermeneutika berubah menjadi metodologi filsafat, dan sungguh pelajaran inti dari filsafat hermeneutika yang diajarkan kepada kita ketika memasuki abad kedua puluh satu sepertinya adalah bahwa kebenaran dapat ditangkap hanya selama mengakui mitos.

DAFTAR PUSTAKA

- Armas, Adnin, 2008. ***Dampak Hermeneutika Schleiermacher dan Dilthey terhadap Studi Al-Qurán***. Jurnal Islamia, Vol. III, No. 3, 2008.
- Baedhowi. 2008. ***Humanisme Islam, Kajian terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bertens, K. 2005. ***Panorama Filsafat Modern***, Cet. I; Jakarta: Penerbit Teraju.
- [Http://id.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika/Studi Hermeneutika dan Penerapannya](http://id.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika/Studi_Hermeneutika_dan_Penerapannya).
- [Http://idhimakalah.wordpress.com / 2007/11/22/hermeneutika-ontologi-eksistensial-heidegger](http://idhimakalah.wordpress.com/2007/11/22/hermeneutika-ontologi-eksistensial-heidegger).
- [Http://irwanmasduqi83.blogspot.com/2007/ 10/peta-kritik-nalar-islam-arkoun-dari.html](http://irwanmasduqi83.blogspot.com/2007/10/peta-kritik-nalar-islam-arkoun-dari.html)
- [Http://irwanmasduqi83.blogspot.com/ 2008 / 09 / kritik - proyek-kritik-nalar-arab-abad-al.html](http://irwanmasduqi83.blogspot.com/2008/09/kritik-proyek-kritik-nalar-arab-abad-al.html).
- [Http://peperonity.com/go/sites/mview/assunnah.karya.indo1/15293598/Hermeneutika dan Bahayanya](http://peperonity.com/go/sites/mview/assunnah.karya.indo1/15293598/Hermeneutika_dan_Bahayanya).
- http://www.groups.yahoo.com/group/psikologi_transformatif.
- [Http://khidr.org/gunawardhana.htm](http://khidr.org/gunawardhana.htm)
- Palmer, Richard E. 2005. ***Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*** diterjemahkan oleh Masnuri Hery dan Damanhuri dengan judul *Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Palmquist, Stephen. 2000. ***The Tree of Philosophy: A Cours of Introduction Lectures for Beginning Student of Philosphy.*** Philosphy Press, Hong Kong. (diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq, S. Ag)
- Salahuddin, Henry. ***Studi Analitis Kritis Terhadap Filsafat Hermeneutik Alquran,*** dalam Blog pada WordPress.com.
- Sumaryono, E. 1993. ***“Kesimpulan” Dalam Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat.*** Yogyakarta: Kanisius.
- Zaid, Nashr Hamid Abu. 2004. ***Hermeneutika Inklusif, Mengatasi Problema Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan Atas Dirkursus Keagamaan.*** Jakarta: ICIP.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2006. ***Hermeneutika Sebagai Produk Pandangan Hidup.*** dalam Kumpulan Makalah Workshop Pemikiran Islam Kontemporer, IKPM cabang Kairo.

ANALISIS MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM PADA KELAS V DAN VI MADRASAH IBTIDAIYAH

Helmiannoor^{*}

Abstrak:

Di antara mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Dengan adanya mata pelajaran tersebut diharapkan para siswa dapat memahami dengan seksama tentang perjalanan agama Islam mulai dari kelahiran Rasulullah SAW. hingga setelah wafatnya. Materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah sudah selayaknya lebih mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik dibandingkan aspek kognitif. Materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 3 dan 4 yang ada pada buku paket kelas V dan VI Madrasah Ibtidaiyah yang ditulis oleh Sugeng Sugiarto (Penerbit: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2009) sudah relevan dari segi keterkaitan materinya dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Namun perlu dikaji ulang apakah materi yang ada pada buku paket Sejarah Kebudayaan Islam kelas V dan VI sudah relevan untuk siswa seusia mereka dalam mempelajari sekian banyak materi yang ada.

Kata Kunci:

Mata Pelajaran, Sejarah Kebudayaan Islam

^{*} Penulis adalah Dosen STAI Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai.

A. Pendahuluan

Rumusan tujuan pendidikan Islam sangatlah relevan dengan rumusan tujuan Pendidikan Nasional. Rumusan tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: Al-Qur'an Hadis, Aqidah akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi, dan melengkapi. Dengan adanya mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam diharapkan para siswa dapat memahami dengan seksama tentang perjalanan agama Islam mulai dari kelahiran Rasulullah SAW. hingga setelah wafatnya.

Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah meliputi:

1. Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW.
2. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang meliputi kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif, peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
3. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib, keperwiraan Nabi Muhammad SAW, peristiwa Fathu Makkah, dan peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW.
4. Peristiwa-peristiwa pada masa khulafaurrasyidin.
5. Sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing.

¹ H. Jamaluddin & Drs. Abdullah Aly, **Kapita Selektta Pendidikan Islam**, (Bandung: Pustaka Setia, 1999 M), hal. 38.

B. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB DI MADRASAH
BAB I
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN
BAHASA ARAB MADRASAH IBTIDAIYAH

Kelas 5:

Smt	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
I	1. Mengetahui peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw ke Yasrib	1.1 Mengidentifikasi sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Ke Yasrib. 1.2 Menceritakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. 1.3 Mengambil hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. ke Yasrib.
	2. Memahami keperwiraan Nabi Muhammad SAW	2.1 Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam membina masyarakat Madinah (sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan). 2.2 Meneladani keperwiraan Nabi Muhammad SAW. dalam membina masyarakat Madinah.
II	3. Mengetahui peristiwa Fathu Makkah	3.1 Mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. 3.2 Menceritakan kronologi peristiwa Fathu Makkah. 3.3 Mengambil ibrah dari peristiwa Fathu Makkah.
	4. Mengidentifikasi peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW.	4.1 Menceritakan peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah SAW. 4.2 Mengambil hikmah dari peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW.

Kelas 6:

Smt	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
	1. Mengetahui sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq	1.1 Menjelaskan arti dan tugas Khulafaur Rasyidin 1.2 Menceritakan silsilah dan kepribadian Abu Bakar as-Sidiq 1.3 Menunjukkan contoh-contoh nilai positif dari khalifah Abu Bakar as-Sidiq 1.4 Meneladani nilai-nilai positif dari kekhalifahan Abu Bakar as-Sidiq
	2. Mengetahui sejarah Khalifah Umar bin al-Khattab	2.1 Menceritakan silsilah dan kepribadian Umar bin al-Khattab serta perjuangannya dalam dakwah Islam. 2.2 Menunjukkan contoh-contoh nilai-nilai positif dari Umar bin al-Khattab. 2.3 Meneladani nilai-nilai positif dari kekhalifahan Umar bin al-Khattab.
	3. Mengetahui sejarah Khalifah Usman bin Affan	3.1 Menceritakan silsilah dan kepribadian Usman bin Affan serta perjuangannya dalam dakwah Islam 3.2 Menunjukkan contoh-contoh nilai-nilai positif dari Usman bin Affan. 3.3 Meneladani nilai-nilai positif dari kekhalifahan Usman bin Affan.
II	4. Mengetahui sejarah khalifah Ali bin Abi Thalib	4.1 Menceritakan silsilah, kepribadian, dan perjuangan khalifah Ali bin Abi Thalib 4.2 Menunjukkan contoh-contoh nilai-nilai positif dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. 4.3 Meneladani nilai-nilai positif dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.
	5. Mengetahui sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah	5.1 Mengidentifikasi tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-masing. 5.2 Menceritakan sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing.

C. Pokok Bahasan

Materi Sejarah Kebudayaan Islam yang kurang relevan diajarkan pada kelas V Madrasah Ibtidaiyah, yaitu murid dituntut dapat memahami keperwiraan Nabi Muhammad SAW. dengan Kompetensi Dasar: mendeskripsikan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dalam membina masyarakat Madinah (sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan) dan meneladani keperwiraan Nabi Muhammad SAW. dalam membina masyarakat Madinah. Adapun materi Sejarah Kebudayaan Islam yang kurang relevan diajarkan pada kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, yaitu menjelaskan arti dan tugas Khulafaur Rasyidin.

1. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dalam membina masyarakat Madinah (sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan).

Setelah Nabi Muhammad SAW. dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat/Negara baru. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah:

- a. Membangun Masjid. Pada masa Nabi Muhammad saw, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan peribadatan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin.
- c. Menyusun *Dustur* (undang-undang).

2. Meneladani keperwiraan Nabi Muhammad SAW. dalam membina masyarakat Madinah.

Berkaitan dengan terbentuknya masyarakat di Madinah, Nabi Muhammad SAW. kemudian menetapkan sebuah *dustur* atau undang-undang yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Piagam Madinah adalah sebagai berikut:

- a. Dengan nama Allah, telah ditetapkan oleh Muhammad, Nabi Allah, bahwa semua orang yang beriman, baik dari suku Quraisy, suku Madinah, maupun dari mana saja, semuanya adalah satu Negara.

- b. Perdamaian dan peperangan akan mengikat semua umat islam.
- c. Orang yahudi yang ikut serta menggabungkan diri dalam Negara Islam akan dilindungi dari semua gangguan, serta mempunyai hak-hak yang sama.
- d. Orang-orang Yahudi bersama umat Islam akan membentuk suatu bangsa campuran dan mereka akan mengamalkan agama mereka sama bebasnya dengan umat Islam.
- e. Sekutu orang Yahudi akan memperoleh keamanan dan kebebasan yang sama.
- f. Sekutu orang Yahudi dan orang-orang islam akan dihormati sebagai penyokong.
- g. Semua umat Islam yang sejati akan memandang rendah orang yang berbuat kejahatan dan tidak akan melindunginya, meskipun dia adalah saudara dekatnya.
- h. Orang yang bersalah akan dituntut dan dihukum.
- i. Orang yahudi akan bergabung dengan umat Islam dalam mempertahankan kota Madinah.²

Ditetapkannya Piagam Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Piagam itu dikemudian hari membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam.

3. Menjelaskan arti dan tugas Khulafaur Rasyidin

Arti Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasulullah yang mendapat bimbingan atau petunjuk. Adapun tugas dari Khulafaur Rasyidin adalah:

- a. Meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW.
- b. Memerangi orang-orang yang merusak agama Islam dan mengajarkan ke jalan yang benar.
- c. Sebagai pemimpin Negara.
- d. Pemimpin Agama.³

² Sugeng Sugiarto, ***Sejarah Kebudayaan Islam 3***, (Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2009), hal. 16.

³ Sugeng Sugiarto, ***Sejarah Kebudayaan Islam 4***, (Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2009), hal. 3.

D. Analisis

1. Analisis Profil dan Isi Buku

Nama Buku	: Sejarah Kebudayaan Islam 3 dan 4.
Penulis	: Sugeng Sugiarto.
Editor	: Yusuf Ibrahim.
Penerbit	: PT. Tiga Serangkai Mandiri.
Tempat/Tahun Terbit	: Solo/2009.

Di sampul depan berwarna biru dan merah muda dengan beraneka warna lainnya. Buku yang ditulis dengan mengacu pada Kurikulum KTSP tahun 2006 ini dimulai dengan kata pengantar, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, petunjuk penggunaan buku, analisis program pengajaran dan daftar Isi.

Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang cukup relevan pada sebagian sub bab, peletakan gambar tersebut juga tepat, karena kebanyakan gambar terletak pada awal penyampaian materi pada setiap judul bab, sehingga dapat memperjelas dari judul sub bab. Bagian isi buku ini diakhiri dengan daftar pustaka. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan evaluasi dalam bentuk beberapa soal baik berbentuk *multiple choies* maupun essay.

2. Analisis Tujuan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah.

Berdasarkan Permenag RI NO. 2 Tahun 2008, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

- a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
- b. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.

- c. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.
- d. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.
- e. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.⁴

Menurut penulis, tujuan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah terlalu banyak dan kurang memperhatikan aspek umur dan psikologi anak. Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, tujuan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam cukup dengan mengenalkan hal-hal yang mendasar tentang sejarah kebudayaan Islam, sehingga tidak akan membuat anak didik merasa terbebani dengan tujuan pembelajaran yang harus mereka capai.

3. Analisis Materi

Fokus materi yang akan penulis analisis adalah pada materi Sejarah Kebudayaan Islam di kelas V dan VI. Untuk materi kelas, penulis menganalisis materi berkenaan “Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. dalam membina masyarakat Madinah (sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan) dan “Meneladani keperwiraan Nabi Muhammad SAW. dalam membina masyarakat Madinah.” Adapun untuk materi kelas 6, penulis menganalisis materi berkenaan “Menjelaskan arti dan tugas Khulafaur Rasyidin”.

Menurut penulis, materi tersebut tidak relevan kalau diajarkan

⁴ Permenag RI NO 2 Tahun 2008, ***Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah***, tth. hal. 19.

pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, karena materi tersebut menjelaskan tentang sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang lebih relevan kalau diajarkan pada jenjang Madrasah Aliyah. Lebih-lebih lagi materi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW. membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan yang mana anak yang duduk pada kelas V Madrasah Ibtidaiyah belum memahami dan belum waktunya memahami tentang hal-hal tersebut. Dengan kata lain, guru harus cermat memilih materi yang betul-betul relevan dan yang tidak dengan usia anak.

Adapun pada materi kelas VI berkenaan dengan “Menjelaskan arti dan tugas Khulafaur Rasyidin”, penulis beranggapan materi ini juga belum relevan kalau diajarkan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah kelas VI, karena bahasannya yang sangat luas mencakup Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin ‘Affan dan Ali bin abi Thalib. Menurut penulis, seharusnya materi ini baru diajarkan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah yang daya berfikirnya sudah mulai berkembang. Dengan demikian, pada materi ini guru seharusnya cukup mengenalkan tentang hal-hal yang mendasar berkenaan dengan arti dan tugas Khulafaur Rasyidin. Adapun untuk mengajarkan hal-hal yang lebih mendalam dan luas dapat dilanjutkan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

4. Analisis Metode Pembelajaran

Berdasarkan Rancangan Perencanaan Pembelajaran (RPP) yang penulis temukan pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas V dan VI Madrasah Ibtidaiyah, metode pembelajaran yang ada pada RPP diantaranya adalah:

- a. Metode Ceramah
- b. Metode diskusi
- c. Metode tanya jawab
- d. Metode *drill*

Menurut penulis, metode-metode ini sudah cukup menunjang dalam proses pembelajaran. Namun, bisa ditambah dengan metode-

metode lain, seperti metode sosiodrama, metode mencontoh tingkah laku/dramatisasi, atau dengan metode audio visual. Dengan metode sosiodrama siswa dapat menceritakan kembali cerita yang telah disampaikan guru dan menyimpulkan hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut. Adapun dengan metode dramatisasi, guru dapat menjadikan siswanya sebagai pemeran yang akan memerankan alur cerita yang ada pada materi tersebut. Sedangkan dengan metode audio visual para siswa dapat melihat langsung gambaran kejadian yang terdapat dalam materi Sejarah Kebudayaan Islam secara konkrit pada film atau video yang ditayangkan di depan kelas. Sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan efektif.

5. Analisis Relevansi Materi dengan Standar Kompetensi dan Analisis Relevansi Materi dengan Kompetensi Dasar

Menurut penulis, materi yang disajikan pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah kelas V dan VI sudah relevan dengan standar kompetensi yang ingin dicapai. Akan tetapi, materi yang disajikan terlalu banyak dan luas pembahasannya untuk anak kelas V dan VI Madrasah Ibtidaiyah. Materi yang ada pada buku paket hendaknya lebih ringkas dan tidak terlalu luas bahasannya. Karena akan mengurangi efektifitas pembelajaran.

Adapun analisis relevansi materi yang disajikan pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah kelas V dan VI, penulis berpendapat materi yang disajikan pada buku paket juga sudah relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Namun menurut penulis, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa seakan-akan dipaksakan, karena ketidaksesuaian usia anak dengan kompetensi dasar yang harus dicapai, juga alokasi waktu yang hanya 2 jam pelajaran dalam satu minggu membuat hasil yang ingin dicapai tidak akan maksimal.

6. Analisa Relevansi Materi dengan Kebutuhan Siswa

Menurut penulis, materi yang disajikan tidak sejalan dengan kebutuhan siswa. Karena materi yang berkenaan dengan kepemimpinan dan pemerintahan belum waktunya diajarkan pada anak yang duduk di

kelas V dan VI Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu, materi yang ada pada buku dianggap terlalu banyak untuk anak seusia mereka, sehingga seakan-akan hanya akan membebani bagi para siswa. Sehingga tujuan dari pembelajaran yang seharusnya berguna serta bermanfaat pada kehidupan dan keseharian setiap peserta didik malah menjadi momok yang membuat peserta didik merasa terbebani. Apalagi peserta didik dituntut memahami dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut penulis, zaman sekarang yang dibutuhkan para peserta didik adalah keteladanan dari para pendidik dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi pelajaran yang mereka pelajari, bukan hanya penguasaan materi saja.

E. Kesimpulan

Materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang ada pada buku paket kelas V dan VI Madrasah Ibtidaiyah sudah relevan dari segi keterkaitan materinya dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Namun perlu dikaji ulang apakah materi yang ada pada buku paket Sejarah Kebudayaan Islam kelas V dan VI sudah relevan untuk siswa seusia mereka mempelajari sekian banyak materi yang ada. Materi yang berkenaan dengan kepemimpinan dan pemerintahan hendaknya tidak diajarkan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, namun bisa diajarkan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah sudah selayaknya lebih mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik dibandingkan aspek kognitif. Karena tujuan pembelajaran sejarah adalah menjadikan sejarah tersebut sebagai pelajaran dan pedoman hidup bagi para peserta didik.

F. Saran

Pelajaran sejarah dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran al-Qur'an Hadits atau Aqidah Akhlak. Dengan demikian beban belajar peserta didik tidak akan terlalu banyak yang kadang melebihi kemampuan fisik dan psikisnya.

Bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah cukup diajarkan hal-hal yang mendasar tentang mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk lebih memperkaya dan memperdalam pengetahuan mereka tentang sejarah kebudayaan Islam bisa diajarkan pada tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

DAFTAR PUSTAKA

Buseri, Kamrani. 2014. **Dasar, Asas, dan Prinsip Pendidikan Islam**. Yogyakarta: Aswaja Persindo.

Jamaluddin, & Aly, Abdullah. 1999. **Kapita Selekta Pendidikan Islam**. Bandung: Pustaka Setia.

Noer Aly, Hery. 1999. **Ilmu Pendidikan Islam**. Jakarta: PT. Logos Wacana ilmu.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.

Shaleh, Abdul Rachman. 2000. **Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi dan Aksi**, Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa.

Sugiarto, Sugeng. 2008. **Sejarah Kebudayaan Islam 3**, Tiga Serangkai.

_____. 2008. **Sejarah Kebudayaan Islam 4**, Tiga Serangkai.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS ISLAMI)

Noorazmah Hidayati *

Abstrak:

Korupsi merupakan salah satu bentuk perampasan hak sosial yang dapat merusak sendi-sendi ekonomi nasional dan merendahkan martabat bangsa. Karenanya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara multidimensional, tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga pendidikan. Pendidikan antikorupsi (PAK) perspektif pendidikan Islam bukan hanya diarahkan pada penghayatan dan pengamalan nilai, tetapi jauh dari itu, pendidikan Islam mempertegas dan memperkuat sisi pendidikan antikorupsi dengan ajaran Islam. Pendidikan antikorupsi dalam pendidikan Islam diwujudkan dengan mengembangkan keimanan, nilai-nilai amanah, jujur, adil dan taqwa yang termuat dalam kurikulum dengan pendekatan intergral dan inklusif, menggunakan metode internalisasi, dan teknik evaluasi yang mengukur aspek verbal dan kognitif serta karakter peserta didik.

Kata Kunci:

Pengertian korupsi, bentuk korupsi, pengertian (PAK), tujuan (PAK), dan kurikulum, metode, evaluasi (PAK).

* Penulis adalah Dosen Tetap STAI Rakha Amuntai Prodi Tadris Bahasa Inggris.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu problem besar suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dampak dari korupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹ Oleh karena itu, korupsi merupakan salah satu bentuk perampasan hak sosial. Tanpa adanya korupsi dapat dikatakan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Sebaliknya, karena korupsi kesejahteraan sosial terampas, sehingga masyarakat hidup dalam kemiskinan.

Dampak yang ditimbulkan akibat praktik korupsi sangat besar, mengingat tindakan korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik. Akibatnya, korupsi dapat merusak sendi-sendi ekonomi nasional, merendahkan martabat bangsa, sehingga korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa dan penindakannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara multidimensional, tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga pendidikan.²

Pendidikan antikorupsi merupakan sarana efektif untuk menanamkan nilai dan sikap antikorupsi sejak dini pada peserta didik. Meskipun pendekatan pendidikan memerlukan waktu yang tidak singkat dan hasilnya tidak dapat dilihat seketika, namun proses pendidikan yang baik diharapkan dapat membentuk budaya dan keyakinan dalam diri peserta didik untuk bersikap dan berperilaku antikorupsi.

¹ Syamsul Anwar dkk., ***Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah***, (Jakarta: PSAP, 2006), hal. ix.

² Abd. Rachman Assegaf, ***Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif***, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 332.

B. Pengertian Korupsi

Korupsi dalam Nanang T. Puspito dinyatakan telah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan aspek-aspek yang terkait dengan korupsi sangat luas. Selanjutnya ia menyatakan bahwa salah satu dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri.³

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dan *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani *corruptio* perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, suap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materil, mental, dan umum.⁴ Di dalam bahasa Inggris disebut *corrupt* atau *corruption* yang berarti jahat, buruk, rusak atau kecurangan, perubahan.⁵ *Corrupt* berarti *willing to use their power to do dishonest or*

³ Agus Mulya Karsona, Pengertian Korupsi, Nanang T. Puspito dkk (ed) dalam ***Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi***, (Jakarta: Kemendikbud RI Dirjen PT Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), hal. 23.

⁴ Kementerian PPN/Bappenas, UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <http://www.bappenas.go.id/node/12315uu-no20-tahun-2001-tentang-perubahan-atas-uu-no31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.mht> , diakses pada 20 Juni 2013, Lihat juga Yulita TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?* Dari bahan training Value Based Education di ISS, Den Haag April 2010 http://sintak.unika.ac.id/staffbloguploaded/5811988034/files/pendidikan_anti_korupsi_di_sekolah,_perluakah.pdf, diakses pada 17 juni 2013.

⁵ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, ***Kamus Inggris-Indonesia***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 149.

illegal things in return for money or to get an advantage, atau berarti juga sebagai *dishonest or immoral*. Adapun *corruption* adalah *dishonest or illegal behaviour, especially of people in authority* atau *the act or effect of making somebody change from moral to immoral standards of behaviour*.⁶ Dalam bahasa Indonesia korup adalah buruk, rusak, busuk, dapat disogok. Korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁷ Dengan demikian, secara bahasa korupsi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang merusak dan bersifat buruk, tidak baik, sehingga merugikan keuangan negara.

Meskipun korupsi merupakan sebuah kata, namun ia memiliki banyak arti atau makna seperti di atas. Dalam Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸

Dalam perspektif hukum Islam, arti kata korupsi juga memiliki kemajemukan. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Amrul Muzan dengan judul “Korupsi, Suap, dan Hadiah dalam Islam” yang termuat dalam Jurnal Hukum Islam Vol. VIII No. 2, Desember 2008, dalam WordPress.com dikemukakan bahwa korupsi memiliki banyak pengertian, termasuk dari sudut pandang fikih Islam. Dalam fikih Islam korupsi juga mempunyai dimensi-dimensi yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena beberapa definisi tentang korupsi merupakan bagian-

⁶ A S Hornby, ***Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English***, (New York: Oxford University Press, 2008), hal. 344.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 736.

⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal. 68-72.

bagian tersendiri dalam fikih Islam. Adapun pengertian fikih Islam yang termasuk dalam makna korupsi adalah *as-sariqah* (pencurian), *al-ghulul* (penyelewengan harta negara), *ar-risywah* (suap), *al-khianah* (khianat).⁹

Risywah atau suap, adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan jabatan, atau wewenang agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Selain itu, pengertian korupsi juga terdapat pada kata *ghulul* yang bermakna mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan memasukkan ke dalam hartanya. Ghulul juga diartikan sebagai penggelapan atau mengambil harta kepunyaan bersama sebelum dibagi untuk kepentingan sendiri.¹⁰

Juga, makna korupsi termuat pada kata hadiah atau gratifikasi, *suht*, *khana*, dan *sariqah*.¹¹ Hadiah dapat juga disebut hibah. Pada dasarnya hadiah merupakan hal yang diperbolehkan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, untuk memperkuat tali silaturahmi atau menjalin ukhuwah Islamiah. Namun, apabila dalam pemberian hadiah tersebut terdapat unsur kepentingan tertentu, maka hadiah yang seperti itu tidak diperbolehkan. Hadiah seperti ini disebut juga dengan *gratifikasi*, yaitu uang hadiah kepada seseorang atau pegawai di luar gaji yang telah ditentukan dengan motif pengubahan kebijakan untuk kepentingan pemberi hadiah.

Suht berarti memperoleh harta haram, sesuatu yang terlarang, yang tidak halal dilakukan karena akan merusak atau menghilangkan

⁹ The Forge Web Creation, ***Perspektif Islam terhadap Korupsi***, <http://WordPress.com>, diakses pada 18 Juni 2013, lihat juga Syamsul Anwar dkk., *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2006), hal. x-xiii.

¹⁰ *Shahih Bukhari jilid III*, alih bahasa Zainuddin Hamidy, dkk, (Jakarta: Widjaya, 1992), hal. 148.

¹¹ Istilah Korupsi dalam Islam, (<http://hukum.kompasiana.com/2011/04/15/istilah-korupsi-dalam-islam-355776.html>), diakses pada 17 Juni 2013.

keberkahan di antaranya dengan menjadi perantara dan menerima imbalan antara seseorang dengan pihak penguasa untuk suatu kepentingan.¹² Dengan kata lain, *suht* berarti memakan harta sebagian yang lain dengan jalan *batil* yang pada dasarnya perbuatan tersebut merugikan masyarakat atau bahkan Negara yang seharusnya harta tersebut digunakan untuk keperluan umum dan untuk memfasilitasi kepentingan sosial.

Khana adalah berkhianat, tidak jujur, pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Adapun *sariqah* bermakna mencuri, merampok.¹³ Jadi, dapat dikatakan korupsi merupakan salah satu bentuk kerusakan moral karena berdampak merugikan kemaslahatan sosial.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan perbuatan korupsi merupakan tindakan curang serta penipuan yang akan merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Tindakan ini dikecam oleh Allah dan diancam dengan hukuman yang setimpal di akhirat, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Atinya:

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imran : 161)

Nabi menegaskan ancaman dari Allah tentang tindakan korupsi sebagaimana sabdanya:

¹² Istilah Korupsi dalam Islam, (<http://hukum.kompasiana.com/2011/04/15/istilah-korupsi-dalam-islam-355776.html>), diakses pada 17 Juni 2013

¹³ Istilah Korupsi dalam Islam, (<http://hukum.kompasiana.com/2011/04/15/istilah-korupsi-dalam-islam-355776.html>), diakses pada 17 Juni 2013

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
«أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِّنَ الْأَرْضِ يَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ
جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِّنْ حَظِّ صَاحِبِهِ
ذِرَاعًا فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Dari Abi Malik Al-Asyja'i dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Ghulul (pengkhianatan/ korupsi) yang paling besar di sisi Allah adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat."¹⁴

Termasuk kategori korupsi adalah kolusi dengan memberikan fasilitas negara kepada orang yang tidak berhak karena adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu, seperti menerima suap dari pihak yang diuntungkannya.¹⁵ Nabi memperingatkan terhadap perilaku ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya:

Dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. **(Shahih)**.¹⁶

¹⁴ HR Ahmad, E book, Syaikh Al-Albani dalam Shahihut Targhiib wat Tarhiib II/ 380 nomor 1869.

¹⁵ Sodikin, **Hukum Islam atas Tindakan Korupsi**, (<http://www.pak-sodikin.com/hukum-islam-atas-tindak-pidana-korupsi.mht>), diakses pada 17 Juni 2013.

¹⁶ M. Nashiruddin al Bany, E book Shahih Sunan Abu Daud jilid II, bab Kitab Peradilan, judul Hadits Keharaman Suap, no. Hadits 3580.

Dari ayat dan hadits di atas dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang dijelaskan merupakan spirit dari korupsi, yakni penggelapan, penipuan, pengkhianatan, dan pengrusakan sehingga merugikan orang lain. Melakukan korupsi berarti merusak atau menodai terhadap kejujuran atau merusak proses yang seharusnya berlangsung dengan cara melakukan suatu penipuan untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan yang bersifat buruk, rusak, khianat tampaknya merupakan spirit dari korupsi.

Terkait dengan hal tersebut, korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah atau disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat karena menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya.¹⁷ Dalam hal ini, tindakan korupsi mengandung unsur pencurian dan penggelapan.

Lebih lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan untuk memahami korupsi dengan mengetahui terlebih dahulu pengertian pencurian dan penggelapan. Pencurian berdasarkan pemahaman pasal 362 KUHP, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, mengambil sebagian atau seluruh milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki atau menguasainya. Barang/hak yang berhasil dimiliki dapat diartikan sebagai keuntungan bagi pelaku. Adapun Penggelapan berdasarkan pemahaman pasal 372 KUHP merupakan

¹⁷ Kementerian PPN/Bappenas, UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <http://www.bappenas.go.id/node/12315uu-no20-tahun-2001-tentang-perubahan-atas-uu-no31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.mht> , diakses pada 20 Juni 2013, lihat juga Tim KPK, Buku Saku: Pahami Dulu Baru Lawan, hal. 7, (www.KPK.go.id), diakses pada 20 Juni 2013.

pencurian barang/hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku.¹⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam tindakan korupsi selalu terkandung unsur pencurian dan penggelapan. Namun, dalam pencurian tidak mesti selalu terdapat unsur penggelapan.

Berdasarkan undang-undang, korupsi diartikan atau dikategorikan sebagai berikut:¹⁹

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2);
2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Lebih lanjut, terdapat beberapa jenis tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi, yakni²⁰ perbuatan yang merugikan negara, suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, dan pemberian hadiah (gratifikasi). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilarang karena spirit dalam tindakan tersebut adalah khianat. Atau, dengan kata lain, korupsi adalah pengkhianatan, yakni pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan padanya.

¹⁸ KPK, ***Mengenali dan Memberantas Korupsi***, dalam Yulita TS, ***Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?***

¹⁹ Evi Hartanti, ***Tindak Pidana Korupsi***, (Sinar Grafika: Jakarta, 2005), hal. 9.

²⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal. 68-72, lihat juga Tim KPK, *Buku Saku: Pahami Dulu Baru Lawan*, hal. 1, (www.KPK.go.id), diakses pada 20 Juni 2013.

C. Bentuk Korupsi

Berikut dipaparkan berbagai bentuk korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi:²¹

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Keuangan Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyuaup	<ol style="list-style-type: none">1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;2. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;3. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;4. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;5. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

²¹ Lihat Agus Mulya Karsona, **Pengertian Korupsi, dalam Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi**, (Jakarta: Kemendikbud RI Dirjen PT Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), hal. 24.

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ol style="list-style-type: none">6. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;7. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;9. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara;10. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
3	Penggelapan dalam Jabatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="517 242 1076 460">2. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;<li data-bbox="517 469 1076 802">3. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;<li data-bbox="517 811 1076 1106">4. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;<li data-bbox="517 1115 1076 1406">5. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
4	Pemerasan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="517 1425 1076 1607">1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		<p>memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="517 396 1076 615">2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;<li data-bbox="517 624 1076 991">3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5	Perbuatan Curang	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="517 1006 1076 1261">1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;<li data-bbox="517 1270 1076 1415">2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;<li data-bbox="517 1425 1076 1603">3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

No	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
		4. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7.	Gratifikasi	1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa tindakan yang terkategori korupsi adalah penggelapan dan pencurian, atau jenis tindak korupsi lainnya yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, aparat pemerintah, atau penyelenggara negara yang merugikan keuangan Negara.²²

D. Pengertian Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan secara umum diartikan sebagai usaha memanusiakan manusia secara manusiawi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan *budi pekerti* (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.²³ Mohammad Natsir dalam tulisannya

²² KPK RI, **Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi**, (Jakarta: KPK, 2006), hal. 47.

²³ Ki Hajar Dewantara, **Pendidikan**, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamaan Siswa, 1977), hal.14, dalam Hujair AH. Sanaky, Pendidikan Anti-

Idiologi Didikan Islam, menyatakan pendidikan merupakan satu kesatuan jasmani dan ruhani menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dalam arti sesungguhnya.²⁴ Adapun anti diartikan sebagai perilaku yang tidak suka, menentang, memusuhi.²⁵ Antikorupsi secara bahasa adalah sikap menentang, memusuhi korupsi. Jadi, pendidikan antikorupsi secara bahasa dapat dikatakan sebagai usaha pembentukan pribadi yang menentang tindakan korupsi sebagai bagian dari wujud manusia sejati.

Pendidikan antikorupsi juga diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan hanya sekadar sebagai media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Dengan kata lain, pendidikan antikorupsi dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi perspektif pendidikan Islam bukan hanya diarahkan pada penghayatan dan pengamalan nilai, tetapi lebih jauh pendidikan Islam mempertegaskan dan memperkuat sisi pendidikan antikorupsi dengan ajaran Islam. Pendidikan antikorupsi dalam pendidikan Islam diwujudkan dengan mengembangkan keimanan, nilai-nilai amanah, jujur, adil dan taqwa.²⁶

Korupsi, <http://sanaky.staff.uui.ac.id/2009/02/05/pendidikan-anti-korupsi/> , diakses pada 18 Juni 2013.

²⁴ Pendidikan Anti Korupsi di UIN/iain/STAIN: **Membangun Budaya Anti Korupsi**, <http://www.csrc.or.id/berita/index.php?detail=051212063548>, diakses pada 18 Juni 2013.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa**, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.75.

²⁶ Asih Sri Lestari, **Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan Islam**, <http://garden.iain-surakarta.ac.idseg.phpa=detil&id=1191.mht>, diakses pada 18 Juni 2013.

E. Tujuan Pendidikan Antikorupsi

Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.²⁷ Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari peserta didik untuk dapat menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Juga, bertujuan untuk membentuk kesadaran peserta didik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan.²⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk membangun nilai-nilai antikorupsi pada diri peserta didik sehingga mampu menghindarkan diri dan melawan korupsi.

Menurut Azyumardi Azra perlunya penanaman nilai anti korupsi di lembaga pendidikan ialah agar ketika lulusan terjun ke masyarakat ia dapat membedakan mana yang termasuk korupsi dan mana yang bukan sehingga mampu menghindarinya.²⁹ Selain itu, tujuan pendidikan antikorupsi, terutama di perguruan tinggi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi peserta didik serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman

²⁷ Abdunnafid, **Model dan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA)**, <http://jipptiain--abdunnafid-8548-7-babv> , hal. 174, diakses pada 18 Juni 2013.

²⁸ Tim MCW, **Seri Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi**, (Jakarta: Kerjasama YAPPIKA dan MCW, 2005), hal. 42-43.

²⁹ Azyumardi Azra, dalam Suara Karya Online edisi 30 Agustus 2006, diakses pada 18 Juni 2013.

korupsi.³⁰

Secara ringkas, tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi pada peserta didik. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.³¹ Atas dasar ini, dapat dikatakan signifikansi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan antikorupsi.

Pendidikan Islam merupakan interelasi antara aqidah, ibadah, muamalah, mengembangkan fitrah dan *hanief*, serta seluruh potensi kemanusiaan untuk mewujudkan fungsinya sebagai abduallah sekaligus khalifatullah menuju manusia sempurna.³² Dapat dikatakan, pendidikan Islam sendiri mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni menciptakan peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap dan mental yang berakhlak mulia sesuai ajaran Islam, dimana setiap tindakan, perilaku harus dibungkus dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi jika dikaitkan dengan perspektif pendidikan Islam tampaknya tujuannya adalah, membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya dalam dimensi pendidikan agama Islam, dapat berkontribusi tentang persepsi korupsi sehingga korupsi

³⁰ Asriana Issa Sofia, Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-Korupsi dalam ***Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi***, 2011, hal. 5.

³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hal.8, lihat juga Usman Abu Bakar dan Surohim, ***Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan: Respon Kreatif Terhadap Undang Undang Sisdiknas***, (Yogyakarta: Safira Insania Press), hal. 4.

³² Kamrani Buseri, ***Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Masyarakat***, makalah disampaikan pada mata kuliah Pengembangan Teori dan Praktik Pendidikan Islam, Program Doktorat IAIN Antasari Banjarmasin pada 6 Maret 2013, hal. 11.

tidak menjadi budaya, dapat membentuk perilaku melawan korupsi yang didasari atas keyakinan bahwa ajaran Islam menentang keras perilaku ahumanis dan amoral, termasuk perbuatan korupsi.

F. Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Terdapat sejumlah nilai budaya yang dapat ditransformasikan institusi pendidikan formal kepada peserta didik agar dapat berperan secara aktif dalam era global dengan ciri kompetisi yang tinggi, di antaranya adalah nilai berorientasi pada keunggulan dan kejujuran. Nilai yang berorientasi pada keunggulan identik dengan motivasi berprestasi individu yang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh melalui serangkaian kerja keras. Adapun Moral kejujuran adalah moral universal, moral yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa modern dan beradab. Bangunan masyarakat yang sehat adalah yang didasarkan atas nilai-nilai kejujuran. Kejujuran pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*), dan kepercayaan merupakan salah satu unsur modal sosial. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat akan lebih mudah melakukan transformasi perubahan, baik itu perubahan sosial maupun perubahan budaya. Untuk itu tugas pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada setiap komponen di dalamnya, baik itu siswa, guru maupun komponen lainnya.³³

Materi pendidikan antikorupsi untuk tingkat SMA dan SMP terdiri dari pengenalan korupsi, dampak korupsi, upaya perlawanan terhadap korupsi, warung kejujuran dan pemilihan pelajar panutan/unggul. Adapun materi untuk kelas 4, 5 dan 6 SD disisipkan ke dalam beberapa mata pelajaran di antaranya pelajaran Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA/IPS dan Kesenian dan Budaya. Materi Anti Korupsi untuk siswa SD terdiri dari tujuh nilai, yakni kejujuran, keberanian, tanggungjawab, kesederhanaan, kepedulian, daya

³³Harmanto, ***Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MT.s***, (UNS: Depdiknas, 2008), hal. 8.

juang, dan keadilan.³⁴

Adapun bahan pembelajaran pendidikan antikorupsi untuk Perguruan Tinggi yang dituliskan dalam buku Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi terdiri dari delapan bab, yaitu: Pengertian Korupsi, Faktor Penyebab Korupsi, Dampak Masif Korupsi, Nilai dan Prinsip Antikorupsi, Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi.³⁵

Jika pada pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah diberikan materi dasar perilaku, maka bagi mahasiswa dapat ditambahkan lebih banyak pengayaan materi termasuk prinsip-prinsip *good governance*, yakni prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, selain materi seperti di atas. Hal ini diharapkan berguna sebagai bekal karena mahasiswa akan segera masuk ke dunia kerja.³⁶ Jika ditilik lebih dalam dari sudut pandang pendidikan Islam, dapat dikatakan spirit dari prinsip *good governance* tersebut adalah prinsip kejujuran dan amanah, dimana *core* dari semua itu adalah keimanan. Oleh karena itu, tampaknya materi keimanan merupakan inti materi pendidikan antikorupsi.

Terkait dengan hal di atas, Rochmat wahab menyatakan bahwa Pendidikan Islam dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang paling efektif dalam menangani perilaku korupsi kini dan mendatang, terutama

³⁴ Niamw, ***Pendidikan Antikorupsi Salah Satu Model Pendidikan Karakter***, [http://Pendidikan Anti Korupsi \(PAK\) Salah Satu Model Pendidikan Karakter Niamw's Blog.mht](http://Pendidikan Anti Korupsi (PAK) Salah Satu Model Pendidikan Karakter Niamw's Blog.mht), diakses pada 18 Juni 2013.

³⁵ Lihat ***Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi***, (Jakarta: Kemendikbud RI Dirjen PT Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), hal. V.

³⁶ Antasari Azhar, ***Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi, Sebagai Perwujudan Semangat Kebangkitan Nasional***, <http://www.esaunggul.ac.id/paperpendidikan-antikorupsi-di-perguruan-tinggi-sebagai-perwujudan-semangat-kebangkitan-nasional-orasi-ilmiah-antasari-azhar-sh-mh-ketua-komisi-pemberantasan-korupsi.mht> , diakses pada 18 Juni 2013.

dalam penangkalan atau pencegahan. Pendidikan Islam yang komprehensif dan utuh menurutnya akan mampu menghasilkan individu bertaqwa, insan kamil yang pada gilirannya tidak hanya mampu mengangkat derajatnya sendiri, melainkan juga derajat dan martabat umat, bahkan masyarakat lain dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menjadikan individu pintar saja, melainkan juga terampil dan bermoral sebagai kesatuan utuh.

Lebih lanjut Rochmat Wahab menyatakan bahwa materi pendidikan Islam terkait dengan fokus penanganan korupsi harus lebih diarahkan pada pendalaman dan penanam aqidah, di samping peningkatan penguasaan dan pemilikan *akhlaqul karimah*. Dengan penguasaan aqidah, setiap peserta didik dalam gerak perilakunya lebih dapat dikendalikan dan dibimbing oleh spirit ketauhidan. Dengan dimilikinya spirit ketauhidan peserta didik akan terhindar dari ilah-ilah lainnya, termasuk ilah materi.³⁷ Dalam hal ini, peserta didik akan terhindar dari segala bentuk perilaku *mazmumah*, terhindar dari mengilahkan hedonisme dan materialisme, bahkan korupsi sekalipun, karena ilahinya hanya Yang Maha Esa, yakni Allah. Dengan demikian, nilai-nilai ilahiah, seperti amanah, jujur, dan seterusnya akan dapat teraplikasikan, terinternalisasi dalam diri dan perilakunya.

Menurut Hasyim Muzadi pendidikan anti korupsi harus ditekankan pada nilai moralitas. Moralitas menjadi bidikan utama langkah preventif pemberantasan korupsi karena moralitas akan menentukan tingkah laku. Secara kriminologis menurutnya penyebab utama korupsi adalah moralitas yang *bobrok* yang mengakibatkan keserakahan. Karena itu, wajar jika moralitas perlu diperbaiki dengan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan dan penyehatan mental masyarakat. Kesehatan

³⁷ Rochmat Wahab, ***Pendidikan Islam untuk Penanganan Korupsi***, dibahas dalam Pengajian I'tikaf Ramadhan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,M.A.%20Dr.%20,%20Prof.%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20UNTUK%20GERAKAN%20ANTIKORUPSI.pdf> , hal. 3, diakses pada 18 Juni 2013

mental (mental health hygiene) masyarakat juga terus ditingkatkan melalui pendidikan formal, informal dan nonformal, termasuk melalui pendidikan budipekerti, wawasan kebangsaan, dan pendidikan agama, tidak terkecuali anak-anak atau peserta didik juga perlu ditingkatkan kesadaran moralnya.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa karakteristik atau kepribadian individu merupakan refleksi iman yang dimiliki. Individu yang berakhlak mulia dengan demikian mengindikasikan terpatrynya iman dalam dirinya, begitu sebaliknya. Karena inti manusia adalah iman, maka pembinaan individu agar menjadi manusia sejati yakni sebagai *abdullah* dan *khalifatullah* dapat dilakukan dengan cara mengisi qalbu dengan mempertebal iman. Iman diisi dan dipertebal dengan materi, bahan, nilai-nilai yang bersumber pada Quran, Hadits, dan *kawn*. Semua yang baik menurut Ilahi, itulah yang harus diisikan, sebab tentunya hal tersebut tidak bertentangan dengan fitrah manusia maupun fitrah alam.³⁹

G. Pendekatan, Metode, dan Evaluasi Pendidikan Antikorupsi

Menurut Arief Rachman pendekatan pendidikan antikorupsi akan kurang tepat jika ia menjadi satu pelajaran khusus. Ia berpendapat hal tersebut karena peserta didik dari jenjang institusi dasar hingga menengah telah terbebani dengan sekian banyak mata pelajaran. Selain itu, terdapat pula beberapa kendala yang akan dihadapi, yakni harus siap dalam hal pengadaan buku-buku antikorupsi dan kesulitan dalam mencari pengajar khusus bidang pendidikan antikorupsi. Ia justru

³⁸ Ahmad Fahrizal Aziz, ***Pendidikan Antikorupsi***, <http://si-fahri.blogspot.com/?m=1> , diakses pada 27 Juni 2013.

³⁹ Lebih jelasnya lihat Ahmad Tafsir, ***Filsafat Pendidikan Islami***, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 7-31, lihat juga Ahmad Tafsir, Problematika Pendidikan Keimanan Zaman Global dan Strategi Pemecahannya, dalam Kamrani Buseri, dkk (ed), *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 1997), hal.20.

menyarankan bahwa pendidikan antikorupsi lebih tepat jika dijadikan sebagai pokok bahasan dalam mata pelajaran yang dianggap relevan.

Materi pelajaran antikorupsi menurutnya dapat diselipkan pada mata pelajaran PPKN, Matematika, Bimbingan Karir, Bahasa, dan PAI. Pokok bahasan dapat mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu, dapat pula berupa nilai-nilai yang mengajarkan kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi.⁴⁰ Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan formal, namun tidak terkotak-kotak ke dalam satu mata pelajaran. Pendidikan antikorupsi dengan demikian, mesti terintegrasi ke dalam berbagai mata pelajaran, sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap dan kebiasaan peserta didik. Dengan kata lain, dapat dikatakan pendekatan yang dianjurkan oleh Arief Rachman adalah pendekatan integral atau inklusif.

Adapun pendekatan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi tampaknya menggunakan pendekatan eksklusif. Hal ini dapat ditelaah dari terdapatnya mata kuliah pendidikan antikorupsi tersendiri dengan silabus, buku atau sumber referensi utama, dan pengajar yang kompeten di bidang seputar korupsi. Di antara perguruan tinggi yang telah menerapkan mata kuliah pendidikan antikorupsi adalah Universitas Paramadina, Institut teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Semarang.⁴¹

Imam Suprayogo juga berpendapat bahwa Pendidikan Islam harus dapat terintegrasi dan masuk ke dalam seluruh relung kehidupan sekolah atau lembaga pendidikan, bahkan dalam keluarga. Ia berkeyakinan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi sebuah budaya dan bahkan peradaban, yang selalu mengajarkan tentang hidup santun,

⁴⁰ Ahmad Fahrizal Aziz, ***Pendidikan Antikorupsi***, <http://si-fahri.blogspot.com/?m=1> , diakses pada 27 Juni 2013.

⁴¹ Lihat ***Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi***, (Jakarta: Kemendikbud RI Dirjen PT Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), hal. Iv.

menghargai dan hormat pada orang lain, penuh kasih sayang, selalu menghindari perbuatan yang tercela, seperti berbohong, tidak jujur, tidak amanah, dan bahkan korupsi.⁴² Dengan kata lain, Pendidikan Islam dapat menjadi pendidikan yang menjauhkan individu dari tindakan yang merugikan orang lain, termasuk korupsi. Untuk maksud tersebut tentunya dukungan kultur dan iklim institusi pendidikan sangat diperlukan, terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa.

Karena penentuan dan penggunaan metode di antaranya tergantung pada kondisi peserta didik, materi, tujuan, media atau sarana, dan kemampuan pengajar, maka tampaknya penentuan metode bersifat kontekstual dan kondisional. Dengan kata lain, dapat dikatakan semua metode dapat digunakan untuk pendidikan antikorupsi. Namun, merujuk pada Ahmad Tafsir metode yang dianggap besar pengaruhnya terhadap penanaman keimanan pada peserta didik adalah metode internalisasi dengan melibatkan metode pembiasaan (faktor internal), keteladanan dan kedisiplinan (faktor eksternal), termasuk disiplin dalam hukuman sebagaimana yang diajarkan Nabi saw. Jadi, proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang corenya iman sebagai titik tolak utama dalam pendidikan antikorupsi dapat dilakukan secara menyeluruh.

Ahmad Tafsir berkeyakinan bahwa salah satu syarat untuk menjadi manusia sejati ialah individu harus taat beragama atau beriman. Ia menggarisbawahi kata beragama. Menurutnya, mengetahui agama tidaklah sulit (*knowing, doing*), sementara menjadi beragama (*being*) memerlukan perjuangan. Oleh karena itu, diperlukan metode yang telah terbukti kehandalannya, yakni metode internalisasi sebagai cara untuk

⁴² Ahmad Fahrizal Aziz, **Pendidikan Antikorupsi**, <http://si-fahri.blogspot.com/?m=1> , diakses pada 27 Juni 2013.

mencapai tujuan *being* manusia, *being* muslim.⁴³ Meskipun demikian, metode lainnya tentu tidak dapat diabaikan pula kebermanfaatannya.

Secara umum, orientasi pendidikan memuat tiga aspek yang harus dimiliki oleh peserta didik. Aspek tersebut adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut bersifat integral, saling terkait dan melengkapi. Terkait dengan materi pendidikan antikorupsi, maka domain yang dianggap perlu dimaksimalkan adalah aspek afektif dan aspek psikomotor, mengingat pendidikan antikorupsi landasan teorinya bertolak dari pendidikan nilai dan watak. Oleh karena itu, teknik evaluasi dan penilaian materi pendidikan antikorupsi tampaknya dapat menggunakan teknik evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur aspek verbal dan kognitif peserta didik saja, namun juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara berpikirnya dalam mengatasi masalah dan memberikan *problem solving*.⁴⁴

H. Penutup

Pendidikan dapat dikatakan berkontribusi dalam mencegah dan mengatasi budaya korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan pendidikan dengan nilai-nilai religius atau keimanan sebagai *core* pengembangan pendidikan di institusi pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang efektif bagi pembentukan pribadi individu atau peserta didik dengan hati nurani atau keimanan yang baik. Keimanan dapat berfungsi sebagai *driving force* bagi terbentuknya sikap dan perilaku terpuji dan akhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan

⁴³ Lihat Ahmad Tafsir, ***Filsafat Pendidikan Islami***, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 223-23, lihat pula Muhaimin, ***Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusust Dunia Pendidikan***, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 102-103.

⁴⁴ Abdunnafid, ***Model dan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA)***, <http://jiptiain--abdunnafid-8548-7-babv> , hal. 210, diakses pada 18 Juni 2013.

keimanan dapat diasumsikan sebagai sarana yang efektif bagi pencegahan sikap dan perilaku korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan terdapat dua hal yang dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku korupsi. Pertama, pengawasan dari luar diri berupa penegakan sistem hukum. Kedua, pengawasan dari dalam diri sendiri berupa hati nurani atau keimanan. Dapat dikatakan baik tidaknya perbuatan individu dipengaruhi oleh kualitas keimanannya. Demikian sebaliknya, jika kualitas keimanan tidak baik dan lemah maka perbuatan yang dilahirkan cenderung tidak baik pula. Oleh karena itu, individu yang berakhlak mulia dengan demikian mengindikasikan terpatrynya iman dalam dirinya, begitu sebaliknya.

Karena inti manusia adalah iman, maka pembinaan individu agar menjadi manusia sejati yakni sebagai *abdullah* dan *khalifatullah* dapat dilakukan dengan cara mengisi *qalbu* dengan mempertebal iman. Iman diisi dan dipertebal dengan materi, bahan, dan nilai-nilai yang bersumber pada Quran, Hadits, dan *kawn*. Dengan demikian, maka individu akan mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah, termasuk korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A S Hornby. 2008. **Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English**. New York: Oxford University Press.
- Abdunnafid. **Model dan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA)**, <http://jiptiain--abdunnafid-8548-7-bab v> , hal. 210, diakses pada 18 Juni 2013.
- Al Bany, M. Nashiruddin. E book Shahih Sunan Abu Daud jilid II, bab Kitab Peradilan, judul Hadits Keharaman Suap, no. Hadits 3580.
- Arif, Syamsuddin. **Al-Ghazali dan Pendidikan Anti Korupsi**. <http://www.hidayatullah.com/read/2786826032013al-ghazali-dan-pendidikan-anti-korupsi.html.mht>, diakses pada 17 Juni 2013
- Assegaf, Abd. Rachman. 2011. **Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azhar, Antasari. **Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi, Sebagai Perwujudan Semangat Kebangkitan Nasional**, <http://www.esaunggul.ac.id/e-paper/pendidikan-antikorupsi-di-perguruan-tinggi-sebagai-perwujudan-semangat-kebangkitan-nasional-orasi-ilmiah-antasari-azhar-sh-mh-ketua-komisi-pemberantasan-korupsi.mht> , diakses pada 18 Juni 2013
- Azhar, Muhammad dkk. 2004. **Pendidikan Anti Korupsi**, Yogyakarta: LP3 UMY.
- Aziz, Ahmad Fahrizal. **Pendidikan Antikorupsi**. <http://si-fahri.blogspot.com/?m=1> , diakses pada 27 Juni 2013
- Azra, Azyumardi. 2002. **Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi**. Jakarta: Kompas.

- Bakar, Usman Abu dan Surohim. Tt. **Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan: Respon Kreatif Terhadap Undang Undang Sisdiknas**. Yogyakarta: Safira Insania Press.
- Biyanto, Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan, Sindo News.com, <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/24/18/700241/pemberantasan-korupsi-melalui-pendidikan>, diakses pada 28 Juni 2013
- Buseri, Kamrani. **Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Masyarakat**. makalah disampaikan pada mata kuliah Pengembangan Teori dan Praktik Pendidikan Islam, Program Doktorat IAIN Antasari Banjarmasin pada 6 Maret 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. 1993. **Kamus Inggris-Indonesia**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Lukman. 2012. **Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam**, dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 10 No. 2 .
- Harmanto. 2008. **Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MTs**. Surabaya: UNS.
- Hartanti, Evi. 2005. **Tindak Pidana Korupsi**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hasibuan, Ahmad Supardi. **Korupsi Dan Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Islam**. <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=327.mht> diakses pada 20 Juni 2013
- Hassan, Fuad. 2004. **Pendidikan adalah pembudayaan: dalam Pendidikan Manusia Indonesia**. Jakarta: Penerbit Kompas.
- HR Ahmad, E book, Syaikh Al-Albani dalam Shahihut Targhiib wat Tarhiib II/ 380 nomor 1869

- Hujair AH. Sanaky, Pendidikan Anti-Korupsi, <http://sanaky.staff.uui.ac.id/2009/02/05/pendidikan-anti-korupsi/>, diakses pada 18 Juni 2013
- Istilah Korupsi dalam Islam, (<http://hukum.kompasiana.com/2011/04/15/istilah-korupsi-dalam-islam-355776.html>), diakses pada 17 Juni 2013
- Karsona, Agus Mulya. Pengertian Korupsi, Nanang T. Puspito dkk (ed) 2011 dalam ***Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi***. Jakarta: Kemendikbud RI Dirjen PT Bagian Hukum Kepegawaian.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2010. Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi, Jakarta: Dirjen Perguruan Tinggi.*
- Kementerian PPN/Bappenas, UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <http://www.bappenas.go.id/node/12315uu-no20-tahun-2001-tentang-perubahan-atas-uu-no31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.mht> , diakses pada 20 Juni 2013
- KPK RI, 2006, ***Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi***. Jakarta: KPK.
- Lestari, Asih Sri. ***Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan Islam***. <http://garden.iain-surakarta.ac.id/seg.php?detil&id=1191>.mht, diakses pada 18 Juni 2013
- Muhaimin. 2006. ***Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusust Dunia Pendidikan***. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2010. ***Tafsir Ayat-ayat Pendidikan: Tafsir al-Ayat al-Tarbawiy***. Jakarta: Rajawali Pers.

Niamw. ***Pendidikan Antikorupsi Salah Satu Model Pendidikan Karakter***, [http://Pendidikan Anti Korupsi \(PAK\) Salah Satu Model Pendidikan Karakter Niamw's Blog.mht](http://Pendidikan Anti Korupsi (PAK) Salah Satu Model Pendidikan Karakter Niamw's Blog.mht), diakses pada 18 Juni 2013

Pendidikan Anti Korupsi di UIN/iain/STAIN: ***Membangun Budaya Anti Korupsi***. <http://www.csrc.or.id/berita/index.php?detail=051212063548>, diakses pada 18 Juni 2013

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011, Jakarta: Kemendikbud RI Dirjen PT Bagian Hukum Kepegawaian.

Rochmat Wahab, *Pendidikan Islam untuk Penanganan Korupsi*, (<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitianRochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MA.%20Dr.%20,%20Prof.%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20UNTUK%20GERAKAN%20ANTIKORUPSI.pdf>) diakses pada 17 Juni 2013

Shahih Bukhari. 1992. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid III*, alih bahasa Zianuddin Hamidy dkk, Jakarta: Widjaya.

Shahih Bukhari. bab La Yasyrab Al Khamr, juz 21, no. Hadits 6274, Maktabah Syamilah.

Sodikin. ***Hukum Islam atas Tindakan Korupsi***. <http://www.pak-sodikin.com/hukum-islam-atas-tindak-pidana-korupsi.mht> , diakses pada 17 Juni 2013

Sofia, Asriana Issa. 2011. Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-Korupsi dalam ***Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi***.

Suparno, Paul. 2005. ***Memberantas Budaya Korupsi Lewat Pendidikan? Dalam Membasmi Kanker Korupsi***, Ed. Pramono U. Tanthowi dkk., Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

- Syamsul Anwar dkk. 2006. **Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah**. Jakarta: PSAP.
- Tafsir, Ahmad. 1997. Problematika Pendidikan Keimanan Zaman Global dan Strategi Pemecahannya, dalam Kamrani Buseri, dkk (ed), **Metodologi Penelitian Pendidikan Islam**. Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin.
- The Forge Web Creation. **Perspektif Islam terhadap Korupsi**, <http://WordPress.com>, diakses pada 18 Juni 2013,
- Tim KPK. **Buku Saku: Pahami Dulu Baru Lawan**. (www.KPK.go.id), diakses pada 20 Juni 2013.
- Tim MCW. 2005. **Seri Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi**. Jakarta: Kerjasama YAPPIKA dan MCW.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, 2003, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Beserta Penjelasannya, 2003, Bandung: Citra Umbara.
- Yulita TS. **Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?** Dari bahan training Value Based Education di ISS, Den Haag April 2010
http://sintak.unika.ac.idstaffbloguploaded5811988034filespeendidikan_anti_korupsi_di_sekolah,_perluakah.pdf, diakses pada 17 juni 2013.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Mustofa Habib Burahman *

Abstrak:

Pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) akan terlaksana dengan secara efektif apabila pelaksanaan proses implementasi terlaksana dan tersistem dengan baik. Hal tersebut merupakan hal yang wajar apabila kurikulum menjadi sasaran tinjauan utama dari para pengawas, supervisor, dan para ahli pendidikan dalam hal pengembangan dan perubahan untuk membuat pendidikan karakter yang lebih baik dalam pendidikan, baik dalam pendidikan umum ataupun pendidikan agama Islam. Maka dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter dalam pendidikan agama Islam, seorang guru PAI harus mempunyai proses dan sistem yang teroganisir dengan baik, sistem implementasi pendidikan tersebut meliputi: perencanaan pembelajaran yang berbasis karakter, pendekatan pembelajaran dalam pendidikan karakter, proses pembelajaran pendidikan karakter dan evaluasi serta tindak lanjut pendidikan karakter tersebut dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

Kata Kunci:

Karakter, sistem, dan implementasi.

* Penulis adalah Dosen STAI Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai.

A. Pendahuluan

Peranan pendidikan sangat penting dan strategis untuk menjamin kelangsungan perkembangan kehidupan bangsa, sebab kemajuan dan kualitas pendidikan yang paling urgen dalam membekali bangsa itu untuk mampu menghadapi segala bentuk tantangan masa depannya, dan salah satu amanah utama yang harus diwujudkan oleh pendidikan bangsa kita adalah bagaimana membangun Insan Indonesia yang berkarakter.

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa¹. Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”²

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

¹ Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025.

² Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Panjang Nasional (RPJPN), sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³

Dalam pendidikan Islam, penempatan pembinaan karakter atau akhlak adalah hal yang paling diutamakan, dan inilah tugas utama diutusny Nabi Muhammad SAW., sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا .⁴

Manusia terbaik dalam Islam adalah manusia yang beriman, dan manusia beriman terbaik adalah manusia yang beriman yang paling baik akhlak atau karakternya. Dan memang dasar utama untuk menjadi manusia Muhsinin yang disebut Allah sebanyak 5 kali, bahwa Dia bersama dengan orang muhsin. Kemudian dinyatakan Nya lagi tentang ganjaran yang luar biasa bagi *muhsinin* ini. Untuk ini, maka adalah tepat manakala pendidikan Islam di arahkan menuju terbentuknya karakter yang mulia bagi peserta didik, karena memang justeru karakter yang mulia inilah yang menjadikan orang dapat mencapai derajat ketaqwaan dan kesalehan hidup.

Insan yang taqwa dan shaleh bukanlah sikap dan perilaku yang datang secara mendadak, tetapi melalui sebuah tahap penyadaran yang

³ Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 Pasal 33 SISDIKNAS.

⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, **Musnad Imam Ahmad bin Hanbal**, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid II, hal. 381.

harus dilakukan sepanjang hayat. Karena itu, pendidikan tidak lain sebagai proses penyadaran diri dan realitas *universum*.⁵ Karena itu pendidikan haruslah di selenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani, antara pendidikan duniawiy dan pendidikan *ukhrawi* sebagai arah dalam membina peserta didik, sehingga pada akhirnya pendidikan itu dapat mengantarkan mereka dalam mencapai kedewasaan yang seimbang antara jasmani dan rohani dan pada akhirnya dapat memperoleh kebahagiaan yang seimbang pula antara dunia dan akhirat.

Dalam rangka menyeimbangkan perilaku, agar tabiat/ akhlak/ karakter menjadi terbangun dengan baik, sehingga bangunan kehidupan akan menjadi baik, maka adalah hal yang tepat sekali, Rasul yang mulia menyatakan bahwa keperutusannya tidak lain adalah untuk membangun akhlak/ karakter ini, sebagaimana sabdanya :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِيْمًا
بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ⁶

Berdasar hadits di atas, jelas bahwa Rasul SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak; karakter sebagai dasar membangun manusia yang berperadaban. Jadi jelas akhlak dalam hubungannya pembentukan generasi yang memiliki peradaban, maka akhlak yang dimaksud bukan sekedar Ilmu Akhlak⁷, tetapi lebih pada penyatuan teori dan praktik, selarasnya ucapan dan perbuatan, tidak melebarnya jarak antara hafalan,

⁵ Abdul Munir Mulkhan, **Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas IPTEK** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 111-112.

⁶ Imam Baihaqi, **Al Sunan Al Kubra Li al Baihaqi, Kitab Al Syahadah**, hadits nomor 19135.

⁷ Ilmu akhlak adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang budi pekerti atau tingkah laku sebagai upaya terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang, dalam <http://www.inilahguru.com/>.

rumus, ayat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan realitas kehidupan riil sehari-hari dalam masyarakat.⁸

Menurut Thomas Lickona, ada sepuluh aspek degradasi moral yang melanda suatu negara yang merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa, dijelaskan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kekerasan pada remaja
2. Penggunaan kata-kata yang memburuk
3. Pengaruh peer group (rekan kelompok) yang kuat dalam tindak kekerasan
4. Meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas
5. Kaburnya batasan moral baik-buruk,
6. Menurunnya etos kerja
7. Rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru
8. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara
9. Membudayanya ketidakjujuran
10. Adanya saling curiga dan kebencian di antara sesama.⁹

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sangat relevan sekali untuk menjawab tantangan kemerosotan karakter di atas, karena pada dasarnya Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah “pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itui sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak”.¹⁰

⁸ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Karakter*, hal. 3.

⁹ Ratna Megawangi, *Implementasi KTSP: Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Untuk TK dan SD* (Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2007), hal. 3.

¹⁰ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet ke-2, hal. 86.

Sampai sekarang pendidikan kita masih terus berorientasi kepada konten pengetahuan. Memang benar kebijakan kurikulum kita sudah sejak lama diubah dari orientasi konten (*content-base curriculum*) ke kompetensi (*competence-base curriculum*). Namun dalam praktik orientasi konten atau orientasi kepada materi muatan pengetahuan, terus saja dipraktikkan. Maka peran guru dalam mengembangkan pembelajaran sangat penting, guru harus mampu mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada konten, tapi juga guru harus mampu mengembangkan keteladanan, membimbing, dan mengarahkan tuntunan sikap dan akhlak mulia untuk membentuk kepribadian dan watak atau karakter, disamping mengembangkan kemampuan-kemampuan teknis bagi para peserta didik.

Dengan dasar arah pendidikan yang dicitakan di negara kita, dan realitas pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan sekarang di sekolah-sekolah pada umumnya, maka penulis ingin menjabarkan secara mendalam tentang konsep pendidikan holistik berbasis karakter dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan diberi judul “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM”.

B. Implementasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran PAI

Implementasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran PAI dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran

Nana Sudjana mengatakan, perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.¹¹ Perencanaan pembelajaran

¹¹ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Menajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hal. 61. Lihat Juga di Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, hal. 16.

yang harus dilakukan oleh seorang guru, secara terperinci dikemukakan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan tentang perencanaan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru, sebagai berikut :

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.¹²

Menurut Ngainun Naim, bahwa ada beberapa asumsi yang harus dipahami oleh seorang guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, yaitu: *pertama*; pembelajaran dirancang untuk membantu siswa belajar secara individual. *Kedua*; pembelajaran dapat dirancang untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. *Ketiga*; perencanaan dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan individu. *Keempat*; perencanaan merupakan implementasi dari pendekatan system terhadap pembelajaran. *Kelima*; perencanaan pembelajaran berpedoman kepada pengetahuan kita tentang “Belajar”, sebab perencanaan disusun adalah untuk siswa belajar.¹³ Dan menurut Unsur-unsur perencanaan itu menurut Nana Sudjana yaitu unsur tujuan, bahan atau isi, metode, dan alat, serta evaluasi.¹⁴

Di samping itu cara yang mudah untuk membuat silabus, RPP, dan bahan ajar yang berwawasan pendidikan karakter adalah dengan

¹² Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

¹³ Ainun Naim, dkk., ***Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007, cet.1, hal., 29-30.

¹⁴ Nana Sudjana, ***Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar***, (Bandug: Sinar Baru Algensindo, 2002), hal. 136.

mengadaptasi silabus, RPP, dan bahan ajar yang telah dibuat/ada dengan menambahkan/mengadaptasi kegiatan pembelajaran yang bersifat memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai, disadarinya pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasinya nilai-nilai.¹⁵

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dalam desain pembelajaran PAI guru agama harus menyusun sillabus, RPP dan bahan ajar yang dirancang berwawasan karakter atau dapat memfasilitasi pengembangan karakter dalam pembelajaran nantinya, dan hal ini dapat dilakukan guru dengan mengadaptasi perencanaan pembelajaran yang sudah dirancang berwawasan karakter atau dapat memfasilitasi pengembangan karakter dalam pembelajaran, hal ini dikemukakan dalam panduan pendidikan karakter untuk SMP, sebagai berikut :

a. Silabus

Silabus memuat SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dirumuskan di dalam silabus pada dasarnya ditujukan untuk memfasilitasi peserta didik menguasai SK/KD.

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dalam penyusunan silabus yang mampu memfasilitasi terjadinya pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan karakter, setidaknya-tidaknya perlu dilakukan perubahan pada tiga komponen silabus berikut:

- 1) Penambahan dan/atau modifikasi kegiatan pembelajaran sehingga ada kegiatan pembelajaran yang mengembangkan karakter

¹⁵ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, hal. 45.

- 2) Penambahan dan/atau modifikasi indikator pencapaian sehingga ada indikator yang terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal karakter
- 3) Penambahan dan/atau modifikasi teknik penilaian sehingga ada teknik penilaian yang dapat mengembangkan dan/atau mengukur perkembangan karakter.¹⁶

Adaptasi silabus yang meliputi kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, dan teknik penilaian harus memperhatikan kesesuaiannya dengan SK dan KD yang harus dicapai oleh peserta didik, tentu harus bersifat lebih memperkuat pencapaian SK dan KD, dan di sisi lain sekaligus mengembangkan karakter.

b. RPP

RPP disusun berdasarkan silabus yang telah dikembangkan oleh sekolah. RPP secara umum tersusun atas SK, KD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Seperti yang terumuskan pada silabus, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian yang dikembangkan di dalam RPP pada dasarnya dipilih untuk menciptakan proses pembelajaran untuk mencapai SK dan KD. Oleh karena itu, agar RPP memberi petunjuk pada guru dalam menciptakan pembelajaran yang berwawasan pada pengembangan karakter, RPP tersebut perlu diadaptasi. Seperti pada adaptasi terhadap silabus, adaptasi yang dimaksud antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dan/atau modifikasi kegiatan pembelajaran sehingga ada kegiatan pembelajaran yang mengembangkan karakter

¹⁶ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, hal. 46.

- 2) Penambahan dan/atau modifikasi indikator pencapaian sehingga ada indikator yang terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal karakter
- 3) Penambahan dan/atau modifikasi teknik penilaian sehingga ada teknik penilaian yang dapat mengembangkan dan/atau mengukur perkembangan karakter¹⁷

Muhaimin mengemukakan ada beberapa kriteria suatu desain instruksional, yaitu; a) Kesesuaian antara topik dengan siswa yang belajar. b) Ketepatan tujuan instruksional. c) Kesesuaian antara tujuan dengan evaluasi. d) Kesesuaian antara aspek kognitif, afektif, psikomotorik (keterampilan). e) Derajat keaktifan siswa dalam belajar. f) efektifitas dan efisiensi dan desain.¹⁸ Sementara Ngainun Naim, dkk., mengemukakan bahwa ada beberapa strategi penerapan sebuah program pendidikan (tentu termasuk pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter), yaitu :

- 1) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku dan pribadi peserta didik seperti apa dan bagaimana yang harus dicapai.
- 2) Memilih sistem pendekatan pembelajaran utama yang di pandang paling tepat guna mencapai sasaran.
- 3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling efektif dan efisien.
- 4) Menetapkan norma-norma dan batas minimum keberhasilan atau criteria dan ukuran keberhasilan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan evaluasi.¹⁹

¹⁷ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011*, hal. 46.

¹⁸ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 193.

¹⁹ Ainun Naim, dkk., *Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007, cet.1, hal. 87.

c. Bahan/buku ajar

Bagian dari perencanaan pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru, adalah bahan/buku ajar yang merupakan salah satu komponen utama dalam pembelajaran. Dalam pedoman memilih dan menyusun bahan ajar, dikemukakan pengertian bahan ajar, sbb.: “materi pembelajaran (*instructional materials*) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai”.²⁰

Berdasar kutipan di atas, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi, baik bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis, terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai yang akan dipelajari peserta didik.

2. Pendekatan Dalam Pembelajaran Untuk Pendidikan Karakter

Pembelajaran PAI yang mengembangkan Pendidikan karakter, maka guru harus memiliki pandangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurhadi dalam Pendekatan Kontekstual, bahwa: “Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata,”²¹ maka untuk mengembangkan hal demikian seharusnya guru agama mengembangkan

²⁰ Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, ***Pedoman Memilih Dan Menyusun Bahan Ajar***, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006, hal. 8.

²¹ Nurhadi, ***Pendekatan Kontekstual***, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasioanal, 2002), hal. 10.

pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam pembelajaran yang dilakukan, sebab sebagaimana pendapat Elaine B. Johnson, yang dikemukakan oleh Mulyasa dalam buku *Menjadi Guru Yang Profesional* mengatakan bahwa *Contextual Teaching and Learning* (CTL) itu merupakan pendekatan yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari.²²

3. Proses pelaksanaan pembelajaran

a. Kegiatan Pendahuluan Pembelajaran

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dalam *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011*, bahwa “ Pendidikan nilai karakter bagi warga sekolah yang dilakukan secara sistematis yang dimulai dari pemberian pengetahuan tentang nilai-nilai karakter, kemudian membawa mereka untuk bisa memahami dan menghayatinya, lalu selanjutnya membuat kondisi bagaimana mereka terbiasa melaksanakan nilai-nilai tersebut sangatlah diperlukan, karena dengan langkah ini diyakini peserta didik dan atau warga sekolah lain yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-nilai kebajikan (moral)”²³ Karenanya berdasar pendapat Muchlas Samani bahwa pendekatan yang dapat digunakan dalam melaksanakan pendidikan karakter, yaitu pendekatan penanaman nilai

²² Enco Mulyasa, ***Menjadi Guru Profesional***, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2007). hal 56

²³ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, ***Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011***, Dalam www.google.com., hal. 20.

(*Inculcation Approach.*), yakni suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa”.²⁴ Berdasar ini, maka pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah tidak bisa hanya dijalankan oleh segelintir orang, tetapi harus dengan melibatkan banyak pihak, sehingga peserta didik dan atau warga sekolah lain yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-nilai kebajikan (moral).²⁵ Maka khusus kalangan siswa, pelaksanaan Pendidikan karakter yang akan dilaksanakan di SMP diintegrasikan dalam system penyelenggaraan sekolah, meliputi:

- 1) Pendidikan karakter secara terpadu dalam pembelajaran
- 2) Pendidikan karakter secara terpadu melalui manajemen sekolah
- 3) Pendidikan karakter secara terpadu melalui kegiatan pembinaan kesiswaan²⁶

Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dalam *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011*, mengemukakan bahwa: Pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik

²⁴ Muchlas Samani Dan Hariyanto, ***Konsep Dan Model Model Pendidikan Karakter***, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset), hal. 107.

²⁵ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, ***Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011***, Dalam www.google.com., hal. 20.

²⁶ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, ***Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011***, Dalam www.google.com., hal. 24-28.

yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran.²⁷

Tugas seorang guru PAI bukan hanya memfasilitasi peserta didik agar menguasai kompetensi yang berhubungan dengan materi dan tujuan pembelajaran semata, tetapi memiliki tugas mulia lainnya, yakni melalui pembelajaran diharapkan dapat memfasilitasi internalisasi nilai-nilai ke dalam perilaku keseharian siswa. Itu artinya guru agama harus membuat rancangan pembelajaran sedemikian rupa, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.²⁸

Sama halnya dengan mata pelajaran PKn, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara langsung berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan karakter, maka secara khusus idealnya pelaksanaan pendidikan karakter harus sampai kepada internalisasi nilai-nilai pada kehidupan peserta didik, sebagaimana dikemukakan dalam panduan pendidikan karakter, sbb.:“Dalam struktur kurikulum SMP, pada dasarnya setiap mata pelajaran memuat materi-materi yang berkaitan dengan karakter. Secara substantif, setidaknya terdapat dua mata pelajaran yang terkait langsung dengan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia, yaitu pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kedua mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang secara langsung

²⁷ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, **Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011**, Dalam www.google.com., hal. 24.

²⁸ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, **Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011**, Dalam www.google.com., hal. 24.

(eksplisit) mengenalkan nilai-nilai, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai. Integrasi pendidikan karakter pada mata-mata pelajaran di SMP mengarah pada internalisasi nilai-nilai di dalam tingkah laku sehari-hari melalui proses pembelajaran dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian”.²⁹

Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan nilai, membangun kepedulian akan nilai, dan membantu internalisasi nilai atau karakter, sebagaimana dikemukakan Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, bahwa:

- 1) Guru datang tepat waktu (contoh nilai yang ditanamkan: disiplin)
- 2) Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang kelas (contoh nilai yang ditanamkan: santun, peduli)
- 3) Berdoa sebelum membuka pelajaran (contoh nilai yang ditanamkan: religius)
- 4) Mengecek kehadiran siswa (contoh nilai yang ditanamkan: disiplin)
- 5) Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya (contoh nilai yang ditanamkan: religius, peduli)
- 6) Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu (contoh nilai yang ditanamkan: disiplin)
- 7) Menegur siswa yang terlambat dengan sopan (contoh nilai yang ditanamkan: disiplin, santun, peduli)

²⁹ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, **Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011**, Dalam www.google.com., hal.24

- 8) Mengaitkan materi/kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter
- 9) Dengan merujuk pada silabus, RPP, dan bahan ajar, menyampaikan butir karakter yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan SK/KD.³⁰

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan guru agama dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran yang meliputi pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan perencanaan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, meminta siswa berdo'a, mengecek kehadiran, memastikan siswa datang tepat waktu, menegur siswa yang terlambat adalah sudah tepat, sebab tindakan itu akan menanamkan nilai disiplin, nilai relegius dan peduli pada sesama. Hal yang perlu dikuatkan lagi oleh guru agama dalam kegiatan pendahuluan ini adalah mendo'akan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan lainnya serta mengaitkan materi/kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter, sebab ini juga untuk menguatkan pengetahuan tentang nilai sekaligus menguatkan implementasi nilai relegius dan kepedulian pada sesama.

b. Kegiatan Inti Pembelajaran

1) Kegiatan Eksplorasi Pembelajaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan

³⁰ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, **Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011**, hal. 52.

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.³¹ Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.³² Dengan demikian guru agama seyogyanya lebih memvariasikan penggunaan metode dan media ini yang diarahkan untuk menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik.

Menurut penjelasan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah:

- a) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;
- b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain.³³

Pada Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, dikemukakan bahwa:

- a) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan

³¹ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

³² Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

³³ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

belajar dari aneka sumber (*contoh nilai yang ditanamkan: mandiri, berfikir logis, kreatif, kerjasama*)

- b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain (*contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, kerja keras*).³⁴

Dengan demikian, guru agama dapat menguatkan aspek pelibatan didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari, dan juga penggunaan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain yang digunakan dalam pembelajaran PAI, maka dalam pembelajaran PAI dapat dilakukan pendidikan karakter yang meliputi *nilai yang ditanamkan: mandiri, berfikir logis, kreatif, kerjasama, dan kerja keras*.

Tugas guru berdasarkan penjelasan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah antara lain:

- a) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
- b) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan
- c) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.³⁵

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah

³⁴ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

³⁵ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

2011, juga dikemukakan bahwa:

- a) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber (contoh nilai yang ditanamkan: mandiri, berfikir logis, kreatif, kerjasama)
- b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain (contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, kerja keras)
- c) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya (contoh nilai yang ditanamkan: kerjasama, saling menghargai, peduli lingkungan)
- d) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran (contoh nilai yang ditanamkan: rasa percaya diri, mandiri)
- e) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan (contoh nilai yang ditanamkan: mandiri, kerjasama, kerja keras)³⁶

Dengan demikian, jika guru agama memformat mushalla sebagai laboratorium keagamaan di sekolah, lalu memaksimalkan memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya serta mau memformat mushalla sekolah sebagai laboratorium keagamaan, maka pendidikan karakter yang bisa ditanamkan adalah nilai: kerjasama, saling menghargai, peduli lingkungan, rasa percaya diri, mandiri dan kerja keras.

2) Kegiatan Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, standar proses yang harus

³⁶ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, **Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011**, hal. 53-54.

dilakukan oleh guru agama menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, adalah:

- a) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;
- b) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
- c) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
- d) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
- e) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
- f) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok;
- g) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
- h) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;
- i) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.³⁷

Dengan demikian berdasar standar proses yang harus dikuatkan lagi oleh guru agama dalam pembelajaran yang dilakukan, adalah kegiatan membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna (terkait dengan kehidupan siswa),

³⁷ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok dan memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan.

Untuk pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI yang diharapkan menurut Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, adalah:

- a) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna (*contoh nilai yang ditanamkan: cinta ilmu, kreatif, logis*)
- b) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis (*contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, percaya diri, kritis, saling menghargai, santun*)
- c) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut (*contoh nilai yang ditanamkan: kreatif, percaya diri, kritis*)
- d) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif (*contoh nilai yang ditanamkan: kerjasama, saling menghargai, tanggung jawab*)
- e) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar (*contoh nilai yang ditanamkan: jujur, disiplin, kerja keras, menghargai*)
- f) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok (*contoh nilai yang ditanamkan: jujur, bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama*)

- g) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok (contoh nilai yang ditanamkan: *percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama*)
- h) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan (contoh nilai yang ditanamkan: *percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama*)
- i) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik (contoh nilai yang ditanamkan: *percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama*)³⁸

Jika dicermati hal yang inti perlu dikuatkan dalam pelaksanaan Elaborasi Pembelajaran PAI yang telah dilakukan guru di atas adalah terletak pada **3** (tiga) aspek, yakni perlunya pembiasaan pembelajaran dengan kerja kelompok, penguatan pada pelaporan baik kelompok atau individual dan pemajangan hasil kerja siswa baik individual atau kelompok, sebab dengan semua ini, akan mengembangkan pendidikan nilai karakter kreatif, percaya diri, kritis, saling menghargai, santun, mandiri dan kerjasama antar peserta didik.

3) Kegiatan Konfirmasi

Standar proses yang harus dilakukan oleh guru agama pada kegiatan konfirmasi, berdasar lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor **41** Tahun **2007** Tanggal **23** November **2007** Tentang Standar Proses. Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, adalah:

- a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

³⁸ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, hal. 54-55.

- b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
- c) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
- d) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
 - (1) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar;
 - (2) Membantu menyelesaikan masalah;
 - (3) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi;
 - (4) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
 - (5) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.³⁹

Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dalam Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, mengemukakan bahwa:

- a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik (*contoh nilai yang ditanamkan: saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis*)
- b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber (*contoh nilai yang ditanamkan: percaya diri, logis, kritis*)
- c) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan

³⁹ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

(contoh nilai yang ditanamkan: *memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri*)⁴⁰

Dengan demikian konfirmasi terhadap hal-hal yang belum dipahami dengan baik oleh para siswanya, kemudian untuk pemberian umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan terhadap keberhasilan peserta didik adalah hal yang tepat dilakukan guru untuk mengembangkan nilai-nilai karakter saling menghargai, percaya diri, santun, kritis dan logis. Sementara memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, harus dilakukan guru agama, karena hal ini akan menanamkan nilai karakter memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri.

Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dalam Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, mengemukakan bahwa: Memfasilitasi peserta didik untuk lebih jauh/dalam/luas memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, antara lain dengan guru:

- a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar (*contoh nilai yang ditanamkan: peduli, santun*);
- b) membantu menyelesaikan masalah (*contoh nilai yang ditanamkan: peduli*);
- c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi (*contoh nilai yang ditanamkan: kritis*);
- d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh (*contoh nilai yang ditanamkan: cinta ilmu*);

⁴⁰ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, hal. 54-55.

e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif (contoh nilai yang ditanamkan: *peduli, percaya diri*).⁴¹

Dengan demikian kegiatan guru agama menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dan memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif, adalah aktivitas yang memang seharusnya dilakukan karena dapat menanamkan nilai karakter peduli, santun dan percaya diri. Sementara yang perlu dikuatkan lagi adalah memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi dan memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, karena ini dapat menanamkan nilai karakter kritis dan cinta ilmu.

c . Kegiatan Penutup

Menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah standar proses yang harus dilakukan oleh guru agama, adalah:

- (1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
- (2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.⁴²

Dengan demikian guru agama bersama siswa menyimpulkan pelajaran dan melakukan penilaian adalah sudah tepat dalam pendidikan karakter, sebab dapat menanamkan nilai

⁴¹ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, ha. 54-55.

⁴² Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

karakter mandiri, kerjasama, kritis, logis, jujur, mengetahui kelebihan dan kekurangan.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembelajaran PAI

Menurut Suharsimi mengemukakan bahwa evaluasi adalah sebagai sebuah proses penentuan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Namun menurut Agus Maimun, bahwa kegiatan evaluasi dalam proses pembelajaran, dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Mengetahui kemajuan belajar peserta didik, baik sebagai individu maupun kelompok
- b. mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi, dan kemenarikan berbagai komponen pembelajaran.
- c. menentukan kegiatan tindak lanjut pembelajaran.⁴³

Berdasar panduan pendidikan karakter SMP dilakukan dengan menggunakan penilaian autentik, sesuai Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah.⁴⁴

Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 menjelaskan bahwa

⁴³ Agus Maimun, ***Pedoman Umum Pengembangan sistem penilaian*** (Malang : UIN, 2004), hal. 5.

⁴⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013, Standar Penilaian Pendidikan, (Lampiran) Bab II tentang Standar Penilaian Pendidikan.

penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidikan dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Lebih lanjut, penilaian belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran (learning outcomes). Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar.⁴⁵

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, bahwa penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Berdasar Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa penilaian itu dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.⁴⁶ Menurut penjelasan Yunus Abidin, bentuk penilaian yang dapat digunakan dalam penilaian sikap ini, adalah:

- a. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.

⁴⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014, Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, (Lampiran) tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik.

⁴⁶ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

- b. Penilaian diri merupakan teknik penilai dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
- c. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembaran penilaian antar peserta didik.
- d. Jurnal merupakan catatan peserta didik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.⁴⁷

Menurut Tayar Yusuf bahwa sekurang-kurangnya ada 3 aspek tentang agama yang harus dievaluasi pada diri seorang anak:

- a. Pengetahuan para siswa tentang agama Islam
- b. Pelaksanaan praktik ibadah dan amaliyahnya
- c. Penghayatan jiwa agama atau akhlak yang baik sehari-hari atau kepribadian mereka.⁴⁸

Dalam panduan pembelajaran berbasis karakter, evaluasi tersebut sebagai berikut :

- a. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran (contoh nilai yang ditanamkan: *saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis*);
- b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan

⁴⁷ Yunus Abidin Abidin. ***Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013***, (Bandung: Refika aditama, 2014), hal. 98.

⁴⁸ Tayar Yusuf, Jurnalis Etek, ***Keragaman Teknik Evaluasi dan Metode Penerapan Jiwa Agama***, (Jakarta: IND-HILL-CO,1987), Cet Ke-1, hal. 24.

- c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
49

Dengan demikian adalah tepat manakala setelah evaluasi pembelajaran PAI, guru agama harus melakukan tindak lanjut berupa umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil evaluasi, dalam bentuk pengembangan nilai yang ditanamkan dan membuat rencana kegiatan tindak lanjut pembelajaran berupa pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, serta penyampaian kegiatan pembelajaran berikutnya, membuat karangan, menyusun laporan (hasil *study tour* atau diskusi kelompok).⁵⁰

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah di ambil beberapa kesimpulan, bahwa Impelementasi pendidikan karakter oleh guru pada pembelajaran PAI meliputi hal berikut :

1. Guru membuat perencanaan pendidikan karakter pada pembelajaran PAI yang meliputi (1) silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memenuhi kriteria standard perencanaan pembelajaran yang berkarakter.
2. Guru menerapkan pendekatan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis pendidikan karakter, pendekatan kontekstual atau *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam pembelajaran adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan, sebab itu merupakan pendekatan yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan dunia kehidupan

⁴⁹ Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Pasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah 2011, hal. 56.

⁵⁰ Syamsu Yusuf LN, ***Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja***, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 178.

peserta didik secara nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari.

3. Guru melaksanakan pembelajaran PAI berbasis pendidikan karakter, sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan pendahuluan pembelajaran yang menuangkan nilai-nilai karakter.
 - b. Untuk kegiatan Inti Pembelajaran, sebagai berikut : 1. Kegiatan Eksplorasi yang menuangkan nilai-nilai karakter. 2. Kegiatan elaborasi, seperti memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas dan tanya jawab, maka karakter yang dikembangkan adalah *kreatif, percaya diri, dan kritis*. 3. Kegiatan konfirmasi, seperti : memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif, dapat menanamkan nilai karakter *peduli, santun dan percaya diri*.
 - c. Guru melaksanakan kegiatan Penutup Pembelajaran yang berpendidikan karakter, seperti : menyimpulkan bersama, melakukan penilaian, dan nasehat/ berdo'a di akhir pembelajaran.
4. Guru melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut, dari kebanyakan hasil penelitian sementara ini, untuk kegiatan tindak lanjut yang ada hanyalah tugas terkait dengan materi, untuk pengembangan karakter belum dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus. 2014. **Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013**. Bandung: Refika aditama.
- Baihaqi, Imam. **Al Sunan Al Kubra Li al Baihaqi**. Kitab Al Syahadah.
- Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010–2025
- Departemen Agama RI. 1981. **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003, **Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching Learning)**. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. **Kegiatan Belajar Mengajar Yang Efektif**. Jakarta: Puskur.
- Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2006. **Pedoman Memilih Dan Menyusun Bahan Ajar**. Departemen Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. 2011. **Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah**. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Maimun, Agus. 2004. **Pedoman Umum Pengembangan sistem penilaian**. Malang: UIN.
- Megawangi, Ratna. 2007. **Implementasi KTSP: Pendidikan Holistik Berbasis Karakter**. Depok: Indonesia Heritage Foundation.
- Muhaimin. 2004. **Pengembangan Pendidikan Islam**. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1998. **Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas IPTEK**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mulyasa, Enco. 2007. **Menjadi Guru Profesional**. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muslich, Masnur. 2000. **Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional**. Malang: Bumi Aksara.
- Naim, Ainun, et.all. 2007. **Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014. **Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**. (Lampiran) tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013, **Standar Penilaian Pendidikan**. (Lampiran) Bab II tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Tentang **Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah**.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2002. **Penilaian Berbasis Kelas**. Jakarta: Balitbang Depdiknas..
- Samani, Muckhlas Dan Hariyanto. 2007. **Konsep Dan Model Model Pendidikan Karakter**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, Nana. 2002. **Dasar-dasar Proses Belajar Menagajar**, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Yusuf, Syamsu. 2001. **Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja**, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Yusuf, Tayar. 1987. **Jurnal Etek, Keragaman Teknik Evaluasi dan Metode Penerapan Jiwa Agama**. Cet Ke-1, Jakarta: Balitbang.

KONSEP KURIKULUM DI SEKOLAH

Musyarapah^{*}

Abstrak:

Kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang disusun secara ilmiah yang mana menjelaskan tentang pengaturan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konsep kurikulum itu sendiri meliputi kurikulum ideal, kurikulum nyata, kurikulum tersembunyi dan kurikulum dan pembelajaran. Secara umum fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan dan jenis peranan kurikulum itu meliputi peranan konservatif, peranan kritis & evaluatif, dan peranan kreatif. Sedangkan komponen kurikulum itu sendiri meliputi komponen tujuan, komponen isi/materi, komponen strategi dan komponen evaluasi.

Kata Kunci:

Konsep Kurikulum, Sekolah

^{*} *Penulis adalah dosen tetap STAI Rakha Amuntai.*

A. PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis dan tingkat sekolah. Kurikulum menjadi dasar dan cermin falsafah pandangan hidup suatu bangsa, akan diarahkan kemana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa ini di masa depan, semua itu ditentukan dan digambarkan dalam suatu kurikulum pendidikan. Kurikulum haruslah dinamis dan terus berkembang untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia dan haruslah menetapkan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Kurikulum sebagai sebuah rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat.

Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai kurikulum ideal, akan tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum yaitu para pengawas pendidikan dan para guru serta pihak-pihak lain yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan, sebagai bahan untuk dijadikan instrumen dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan berbagai landasan yang kuat agar mampu dijadikan dasar pijakan dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien.

Salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan dalam kurikulum adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh

karena itu, kurikulum di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut, agar tujuan pembelajaran di sekolah dapat tercapai, maka hendaknya kurikulum di sekolah dirancang dan dipersiapkan dengan matang sesuai dengan kebutuhan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Kurikulum

Secara etimologis, istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang artinya “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi Kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti berlari (*to run*). Kurikulum berarti sudah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis *start* sampai garis *finish* untuk memperoleh medali atau penghargaan.¹

Sedangkan menurut Ragan (1966) dalam bukunya *Modern Elementary Curriculum* seperti yang dikutip oleh Nasution, menyebutkan bahwa *The curriculum has mean the subject taught in school or the course of study*.² Sekalipun pengertian ini tergolong tradisional, tetapi paling tidak orang bisa mengenal dan mengetahui pengertian kurikulum yang pertama. Implikasi dari pengertian tradisional tersebut adalah: (a) kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, (b) peserta didik harus mempelajari dan menguasai seluruh mata pelajaran, (c) mata pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah secara terpisah-pisah, dan (d) tujuan akhir kurikulum adalah untuk memperoleh ijazah.

Akhir-akhir ini ada pergeseran pemikiran tentang tugas mendidik anak. Banyak orang tua yang mempercayakan atau menyerahkan tugas mendidik kepada pihak sekolah, meskipun

¹ Oemar Hamalik, ***Kurikulum dan Pembelajaran***, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 2.

² S. Nasution, ***Asas-asas Kurikulum***, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 4.

kenyataannya peserta didik lebih banyak waktu berada di lingkungan keluarga (di rumah) dan lingkungan masyarakat umum. Hal ini berdampak pula terhadap perubahan pengertian kurikulum secara luas.

Pengertian kurikulum secara modern adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial (isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Implikasi pengertian ini, antara lain: (a) kurikulum tidak hanya terdiri atas sejumlah mata pelajaran, tetapi juga meliputi semua kegiatan dan pengalaman potensial yang telah disusun secara ilmiah, (b) kegiatan dan pengalaman belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di luar sekolah, (c) guru sebagai pengembang kurikulum perlu menggunakan multistrategi dan pendekatan, serta berbagai sumber belajar secara bervariasi, (d) tujuan akhir kurikulum bukan untuk memperoleh ijazah, tetapi untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sedangkan perbedaan antara kurikulum tradisional dengan kurikulum modern adalah sebagai berikut:

Aspek-aspek	Kurikulum Tradisional	Kurikulum Modern
Orientasi	Masa lampau	Masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Dasar Falsafah	Tidak berdasarkan filsafat pendidikan yang jelas	Berdasarkan filsafat pendidikan yang jelas dan dapat dimujudkan dalam kegiatan yang kongkret
Tujuan Pendidikan	Mengutamakan pengetahuan	Mengembangkan keseluruhan pribadi peserta didik secara utuh
Organisasi Kurikulum	Berpusat pada mata pelajaran	Berpusat pada masalah atau topik di mana peserta didik belajar mengalami sendiri secara langsung
Sumber Belajar	Guru sebagai satu-satunya sumber belajar	Di samping guru, ada juga sumber belajar yang lain, seperti pakar, kegiatan, bahan, alat dan perlengkapan, gedung, dll
Strategi dan Pendekatan Pembelajaran	Cenderung hanya menggunakan strategi ekspositori dengan pendekatan klasikal	Menggunakan multi strategi dan berbagai pendekatan (individual, kelompok, dan klasikal)

Aspek-aspek	Kurikulum Tradisional	Kurikulum Modern
Teknis Evaluasi	Tes sebagai satu-satunya teknik penilaian	Tidak hanya tes tetapi juga non tes
Peran Guru	Peran guru sangat terbatas dan sifat perorangan. Guru adalah cardinal factor	Peran guru sangat luas dan bersifat kolektif-kolegial dengan tidak mengurangi kebebasan guru. Guru harus aktif, kreatif, inovatif, konstruktif, adaptif, kondusif

Sedangkan pengertian kurikulum dalam perspektif yuridis-formal, yaitu menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Bab 1 Pasal 1 ayat 19). Pengertian kurikulum ini lebih banyak berhubungan dengan fungsi dan kegiatan guru sebagai pengembangan kurikulum di sekolah, baik dalam dimensi rencana, dimensi kegiatan maupun dimensi hasil. Implikasi dari pengertian ini adalah: *pertama*, kurikulum harus memiliki rencana. Rencana yang dimaksud biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang kemudian dikenal dengan konsep kurikulum sebagai dokumen tertulis. *Kedua*, di dalam kurikulum terdapat tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. *Ketiga*, kurikulum harus ada hasil sesuai dengan tujuan pendidikan, baik yang berbentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai. Hasil yang dimaksud merupakan hasil belajar peserta didik sebagai akibat terjadinya kegiatan belajar.

Berdasarkan dari beberapa pengertian kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang disusun secara ilmiah yang mana menjelaskan tentang pengaturan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam studi tentang kurikulum, dikenal pula beberapa konsep kurikulum, seperti:

- a. Kurikulum ideal (*ideal curriculum*), yaitu kurikulum yang berisikan sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan, sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum.
- b. Kurikulum nyata (*real curriculum or actual curriculum*), yaitu kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan dalam proses pembelajaran atau yang menjadikan kenyataan dari kurikulum yang direncanakan, sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum. Kurikulum aktual ini seyogyanya sama dengan kurikulum ideal, atau sekurang-kurangnya mendekati kurikulum ideal, meskipun tak mungkin sama dalam kenyataannya.
- c. Kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), yaitu segala sesuatu yang memengaruhi peserta didik secara positif ketika sedang mempelajari sesuatu. Pengaruh itu mungkin dari pribadi guru, peserta didik itu sendiri, karyawan sekolah, suasana pembelajaran dan sebagainya.
- d. Kurikulum dan pembelajaran (*curriculum and instruction*), yaitu dua istilah yang berbeda tetapi tak dapat dipisahkan satu sama lain, seperti dua sisi mata uang. Perbedaannya hanya terletak pada tingkatannya. Kurikulum menunjukkan pada suatu program yang bersifat umum, untuk jangka lama, dan tak dapat dicapai dalam waktu seketika, sedangkan pembelajaran bersifat realitas atau nyata, sifatnya khusus dan harus dicapai saat itu juga. Pembelajaran adalah implementasi kurikulum secara nyata dan bertahap yang menuntut peran aktif peserta didik.

2. Dimensi-Dimensi Kurikulum

Setiap pengertian kurikulum bukan hanya menunjukkan rumusan definisi dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan tanpa makna, tetapi juga menggambarkan *scope and sequences* isi kurikulum, komponen-komponen kurikulum, dan aspek-aspek kegiatan kurikulum. Schubert (1986) memerinci pengertian kurikulum dalam berbagai dimensi, yaitu:

kurikulum sebagai *content* atau *subject matter*, kurikulum sebagai *program of planned activities*, kurikulum sebagai *intended learning outcomes*, kurikulum sebagai *cultural reproduction*, kurikulum sebagai *experience*, kurikulum sebagai *discrete task and concepts*, kurikulum sebagai agenda *for social reconstruction* dan kurikulum sebagai *currere*.³

Sedangkan Hasan (1988) berpendapat ada empat dimensi kurikulum yang saling berhubungan, yaitu: kurikulum sebagai suatu idea atau konsepsi, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan (proses), dan kurikulum sebagai suatu hasil belajar.⁴ Selanjutnya, Sukmadinata (2005) meninjau kurikulum dari tiga dimensi, yaitu sebagai sistem, kurikulum sebagai ilmu dan kurikulum sebagai rencana.⁵ Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada enam dimensi kurikulum, yaitu:

a. Kurikulum sebagai suatu ide

Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ide atau gagasan tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti Kepala Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan sebagainya. Ketika orang berpikir tentang tujuan sekolah, materi yang harus disampaikan kepada peserta didik, kegiatan yang harus dilakukan oleh guru, orang tua dan peserta didik, objek evaluasi, maka itulah dimensi kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi. Perbedaan ide dari orang-orang

³ William H. Schubert, ***Curriculum: Perspective, Pradigm, and Possibility***, (New York: McMillan Publishing Company, 1986), p. 25.

⁴ S. Hamid Hasan, ***Evaluasi Kurikulum***, (Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 1988), hal. 23.

⁵ Nana Sy. Sukmadinata, ***Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek***, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 29.

tersebut sangat penting untuk dianalisis bahkan dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum. Dari sekian banyak ide-ide yang berkembang dalam studi pendapat tersebut, maka akan dipilih dan ditentukan ide-ide mana yang dianggap paling kreatif, inovatif, dan konstruktif sesuai dengan visi-misi dan tujuan pendidikan nasional.

b. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis

Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis sehingga dapat dilihat, mudah dibaca dan dianalisis yang merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Aspek-aspek penting yang perlu dibahas, antara lain: pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi.

c. Kurikulum sebagai suatu kegiatan

Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan (*real curriculum*). Peserta didik mungkin saja memikirkan kurikulum sebagai ide, tetapi apa yang dialaminya merupakan kurikulum sebagai kenyataan. Antara ide dan pengalaman mungkin sejalan tetapi mungkin juga tidak. Banyak ahli kurikulum yang masih mempertentangkan dimensi ini, dalam arti apakah sesuatu kegiatan termasuk kurikulum atau bukan. Misalnya, MacDonald (1965), Johnson (1971), Popham dan Baker (1970), Inlow (1973), dan Beauchamp (1975) tidak menganggap suatu kegiatan sebagai kurikulum. Bagi Beauchamp, kurikulum adalah *a written document* yang masuk dalam dimensi rencana, sedangkan ahli lainnya melihat kurikulum hanya sebagai hasil belajar. Namun demikian, banyak juga ahli kurikulum lain yang mengatakan suatu kegiatan atau proses termasuk kurikulum, seperti Frost dan Rowland (1969), Zais (1976), Egan (1978), Hunkins (1980), Tanner and Tanner (1980), serta Schubert (1986).

Kurikulum harus dimaknai dalam satu kesatuan yang utuh. Jika suatu kegiatan tidak termasuk kurikulum berarti semua kegiatan di sekolah atau di luar sekolah (seperti program latihan profesi, kuliah kerja nyata, dan lain-lain) tidak termasuk kurikulum. Dengan demikian, hasil belajar peserta didik juga bukan kurikulum. Padahal apa yang diperoleh peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah merupakan refleksi dan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai rencana tertulis. Apa yang dilakukan peserta didik di kelas juga merupakan implementasi kurikulum. Artinya, antara kurikulum sebagai ide dengan kurikulum sebagai kegiatan (proses) merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, suatu kesatuan yang utuh. Tidak ada alasan untuk mengatakan dimensi kurikulum sebagai suatu kegiatan bukan merupakan kurikulum, karena semua kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah merupakan bagian dari kurikulum.

d. Kurikulum sebagai hasil belajar

Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri atas berbagai domain, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai. Hasil belajar juga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor guru, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan. Kurikulum sebagai hasil belajar merupakan kelanjutan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan serta kurikulum sebagai ide. Menurut Arifin (2009) hasil belajar memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik, sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu, sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan, sebagai indikator interen dan eksteren dari suatu institusi pendidikan, dan dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) peserta didik.⁶

e. Kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu

⁶ Zainal Arifin, ***Evaluasi Pembelajaran***, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 42.

Sebagai suatu disiplin ilmu, berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum, peneliti kurikulum, guru atau calon guru, kepala sekolah, pengawas atau tenaga kependidikan lainnya yang ingin mempelajari tentang kurikulum. Di Indonesia, pada tingkat sekolah menengah pernah ada Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Guru Atas, Pendidikan Guru Agama (PGA) dan lain-lain. Pada tingkat universitas ada juga program studi pengembangan kurikulum, baik di jenjang S.1 (sarjana), S.2 (magister) maupun S.3 (Doktor). Semua peserta didiknya wajib mempelajari tentang kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu adalah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum.

f. Kurikulum sebagai suatu sistem

Suatu sistem kurikulum di sekolah merupakan sistem tentang kurikulum apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Sistem kurikulum mencakup tahap-tahap pengembangan kurikulum itu sendiri, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem juga meng-gambarkan tentang komponen-komponen kurikulum.

3. Fungsi Kurikulum

Secara umum fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Dilihat dari cakupan dan tujuannya menurut McNeil (1990) isi kurikulum memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi pendidikan umum (*common and general education*)

Fungsi pendidikan umum, yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kurikulum harus memberikan pengalaman belajar kepada setiap peserta didik agar mampu menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan, memahami setiap

hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial.

b. *Suplementasi (supplementation)*

Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata harus terlayani untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal, sebaliknya siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata juga harus terlayani sesuai dengan kemampuannya.

c. *Eksplorasi*

Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan.

d. *Keahlian (spesialization)*

Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri, atau disiplin akademik. Yang bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan-keterampilan sesuai dengan bidang spesialis-nya. Untuk itu pengembangan kurikulum harus melibatkan para spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan bidang keahliannya.⁷

Memperhatikan fungsi-fungsi di atas, maka jelas kurikulum

⁷ John, D McNeil, ***Curriculum a Comprehensive Introduction***, (Glenview Illinois: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education, 1990), p. 51.

berfungsi untuk setiap orang atau lembaga yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.

Dilihat dari sisi pengembangan kurikulum (guru), kurikulum mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) fungsi preventif, yaitu mencegah kesalahan para pengembang kurikulum terutama dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kurikulum, (b) fungsi korektif, yaitu mengoreksi dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam melaksanakan kurikulum, dan (c) fungsi konstruktif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi para pelaksana dan pengembang kurikulum untuk membangun kurikulum yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sementara Taba (1962) mengemukakan terdapat tiga fungsi kurikulum, yaitu: (a) sebagai transmisi, yaitu mewariskan nilai-nilai kebudayaan, (b) sebagai transformasi, yaitu melakukan perubahan atau rekonstruksi sosial, dan (c) sebagai pengembangan individu.⁸

Dilihat dari sisi peserta didik, Alexander Inglis mengemukakan beberapa fungsi kurikulum sebagai berikut: (a) fungsi penyesuaian (*the adjustive or adaptive function*), yaitu membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara menyeluruh; (b) fungsi pengintegrasian (*the integrating function*), yaitu membentuk pribadi-pribadi yang terintegrasi sehingga mampu bermasyarakat; (c) fungsi perbedaan (*the differentiating function*), yaitu membantu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam masyarakat; (d) fungsi persiapan (*the propaedeutic function*), yaitu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (e) fungsi pemilihan (*the selective function*). Yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih program-program pembelajaran secara selektif sesuai dengan kemampuan, minat dan kebutuhannya, dan (f) fungsi diagnostik (*the diagnostic function*), yaitu membantu peserta didik untuk memahami dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.

⁸ Hilda Taba, **Curriculum Development: Teoryand Partice**, (New York: Harcourt, Brace Word Inc, 1962), p. 68.

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar.

4. Peranan Kurikulum

Menurut Hamalik (2013) terdapat tiga jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu:

- a. Peranan konservatif yaitu peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat.
- b. Peranan kritis dan evaluatif yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu.
- c. Peranan kreatif, yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman belajar yang kreatif, efektif, dan kondusif. Kurikulum harus dapat merangsang pola berpikir dan pola bertindak peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang baru sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarga, bangsa dan negara.⁹

5. Teori Kurikulum

Teori kurikulum dapat ditinjau dari dua fungsi pokok, yaitu: pertama, sebagai alat dan kegiatan intelektual untuk memahami

⁹ Oemar Hamalik, *op.cit.*, hal. 33.

pengalaman belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang dibantu oleh disiplin ilmu sosial lainnya. Dalam fungsi ini tidak digunakan data-data empiris. Teori kurikulum bukan menjadi acuan dalam implementasi kurikulum (praktik pembelajaran). Kedua, sebagai suatu strategi atau metode untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan berdasarkan data-data empiris. Fungsi kedua ini lebih banyak menganalisis hubungan antara teori dengan praktik.

McNeil (1990) menegaskan teori kurikulum harus dapat menjelaskan dan memprediksi hubungan antara berbagai variabel kurikulum dengan tujuan, proses belajar, dan perencanaan program.¹⁰ Implikasinya, teori kurikulum harus dapat (a) menjadi acuan dalam penelitian dan pengembangan kurikulum serta menjadi alat evaluasi kurikulum, (b) mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai variabel dan hubungannya dengan komponen-komponen kurikulum yang dapat divalidasi secara empiris, (c) menjadikan prinsip-prinsip dan hubungan-hubungan yang dapat diuji secara empiris untuk mengembangkan kurikulum, dan (d) menjadikan kegiatan intelektual yang kreatif. Melalui suatu teori kurikulum tertentu diharapkan kurikulum itu lebih bermakna bagi peserta didik.

Dalam mengembangkan teori kurikulum sebagai disiplin ilmu, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) menggunakan bahasa yang tepat dan ilmiah agar lebih bersifat objektif dan bukan persuasif, (b) prinsip-prinsip dan metode-metode baru yang lebih efektif, (c) peran teori dari disiplin ilmu lainnya dalam kurikulum, dan (e) keseimbangan antara teori dan praktik.

6. Kedudukan Kurikulum dalam Sisdiknas

Pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Dalam penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga

¹⁰ McNeil, John, D., *op.cit.*, p. 18.

Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Berdasarkan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, harus ada suatu alat yang disebut dengan kurikulum. Dengan demikian, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedudukan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional dipandang sangat strategis dan vital karena kurikulum akan mengarahkan semua kegiatan pendidikan, termasuk sarana dan prasarana serta orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kedudukan kurikulum dapat juga dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, peserta didik, lingkungan, sarana dan prasarana, manajemen, dan teknologi. Berdasarkan komponen-komponen ini jelas bahwa kurikulum mempunyai kedudukan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan kedudukan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional di atas, maka ada beberapa implikasi terhadap hakikat dan

pengembangan kurikulum, yaitu: (1) kurikulum harus disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, berakar pada kebudayaan dan kepribadian bangsa serta diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, (2) kurikulum untuk semua jenis dan jenjang pendidikan harus dikembangkan secara berkesinambungan dan fungsional terhadap perkembangan peserta didik dan masyarakat, (3) sesuai dengan prinsip persamaan dan perbedaan individual, dikaitkan pula dengan fungsi sekolah sebagai wadah pewarisan pesan-pesan bangsa dan negara, maka dalam kurikulum perlu dibedakan antara program inti (*core program*) dengan program pilihan sesuai dengan bakat, minat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan, (4) struktur materi dan proses pembelajaran harus dirancang dengan sebaik-baiknya dan diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara perkembangan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor pada diri peserta didik, dan (5) kurikulum tidak hanya ditujukan untuk membentuk kemampuan akademik dan nilai-nilai pribadi, tetapi juga untuk menumbuhkan kemampuan belajar untuk belajar dan untuk mengembangkan diri sendiri.

7. Hubungan Kurikulum dengan Pembelajaran

Dalam beberapa literatur, seringkali istilah “kurikulum” dan “pembelajaran” diartikan sama. Padahal, kedua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda, baik secara konseptual maupun praktiknya. Kurikulum merupakan pengalaman belajar yang terorganisasi dalam bentuk tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah, sedangkan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar terjadi tindakan belajar sehingga memperoleh pengalaman belajar. Kurikulum merupakan program pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik.

Tujuan pendidikan, antara lain agar peserta didik mampu terjun ke masyarakat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki kepribadian yang baik. Untuk itu, peserta didik harus belajar berbagai disiplin ilmu, seperti sosial-ekonomi, sains dan matematika, bahasa, teknologi, norma dan sebagainya, termasuk bagaimana cara menerapkan

ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai disiplin ilmu tersebut tentu harus dipelajari dalam sebuah proses yang disebut dengan pembelajaran. Hubungan lain antara kurikulum dengan pembelajaran dapat juga dilihat dari silabus dalam setiap mata pelajaran. Silabus ini biasanya disusun dalam satu semester dan terdiri atas berbagai komponen, antara lain: standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, urutan topik-topik, skenario pembelajaran, pendekatan dan strategi, media dan sumber belajar serta sistem penilaian. Jika diperhatikan, komponen-komponen silabus ini memiliki kesamaan dengan komponen-komponen pembelajaran.

8. Manajemen Kurikulum

Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu “manajemen” dan “kurikulum”. Kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi di sekolah, halaman sekolah atau di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu tersebut tentunya harus dilakukan secara sistematis dan sistematis melalui tahap-tahap kegiatan tertentu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak, monitoring dan evaluasi. Manajemen adalah suatu proses nyata tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerak, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.

Perencanaan adalah proses penyusunan, penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu dan rasional agar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Pengorganisasian secara terintegrasi, baik secara vertikal maupun horizontal, dan membagi habis tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga struktur tersebut dapat berfungsi dengan baik dan pada akhirnya tujuan dapat tercapai. Penggerakan adalah memotivasi dan merangsang anggota kelompok untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi.

Pengawasan adalah tindakan untuk menuntun dan mendeteksi pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari perencanaan.

Berdasarkan pengertian dari setiap fungsi manajemen di atas, jelas bahwa kegiatan pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan, bahkan termasuk monitoring dan evaluasi. Ilmu manajemen harus menjadi landasan pokok dalam studi pengembangan kurikulum. Di dalam ilmu manajemen dan kurikulum terdapat satu faktor kunci yang sama dan harus ada, yaitu orang. Artinya seindah apapun desain kurikulum pada akhirnya terletak di tangan guru. Keberhasilan manajemen kurikulum sangat dipengaruhi oleh faktor manusianya, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat pelaksana di lapangan.

9. Komponen Kurikulum

G. G. Unruh dan A. Unruh (1984) mengembangkan kurikulum berdasarkan definisi kurikulum yaitu suatu rencana tentang (a) tujuan, (b) isi dari apa yang dipelajari, (c) proses pembelajaran, (d) evaluasi untuk hasil hasil pembelajaran.¹¹

a. Komponen Tujuan

Tujuan sebagai sebuah komponen kurikulum adalah kekuatan-kekuatan fundamental yang peka sekali, karena hasil kurikuler yang diinginkan tidak hanya mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberi arahan dan fokus untuk seluruh program pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional dirumuskan langsung oleh pemerintah sebagai pedoman bagi pengembangan tujuan-tujuan pendidikan yang lebih khusus. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang

¹¹ Glenys G. Unruh dan Adolph Unruh, ***Curriculum Development: Problems, Processes, and Progress***, (Barkeley, California: McCutchan Publishing Corporation, 1984), p. 9.

studi atau mata pelajaran, seperti bidang studi Pendidikan Agama Islam, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran umum adalah tujuan yang ingin dicapai pada setiap pokok bahasan, sedangkan tujuan pembelajaran khusus adalah tujuan dari setiap subpokok bahasan.

Taba (1962) memberikan beberapa petunjuk tentang cara merumuskan tujuan, yaitu (a) tujuan itu hendaknya berdimensi dua, yaitu dimensi proses dan dimensi produk, (b) menganalisis tujuan yang bersifat umum dan kompleks menjadi tujuan yang spesifik, sehingga diperoleh bentuk kelakuan yang diharapkan, (c) memberi petunjuk tentang pengalaman apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, (d) suatu tujuan tidak selalu dapat dicapai dengan segera, kadang-kadang memerlukan waktu yang lama, (e) tujuan harus realistis dan dapat diterjemahkan dalam bentuk kegiatan atau pengalaman belajar tertentu, dan (f) tujuan itu harus komprehensif, artinya meliputi segala tujuan yang ingin dicapai di sekolah, bukan hanya penyampaian informasi, tetapi juga keterampilan berpikir, hubungan sosial, sikap terhadap bangsa dan negara, dan sebagainya.¹²

Selanjutnya Robert F. Mager memberikan petunjuk tentang cara merumuskan tujuan, yaitu: (a) tujuan itu harus spesifik dan dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur, (b) harus dinyatakan dalam kondisi apa tujuan itu dicapai, (c) harus ditentukan kriteria tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik, dan (d) hendaknya menggunakan kata kerja operasional.

b. Komponen Isi/Materi

Fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal adalah memilih dan menyusun isi (materi/pengalaman belajar) agar keinginan tujuan kurikulum dapat dicapai dengan cara paling efektif dan supaya pengetahuan paling penting yang diinginkan

¹² Hilda Taba, *op.cit.*, p. 26.

pada jalurnya dapat disajikan secara efektif.

Isi/materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu (a) logika, yaitu pengetahuan tentang benar-salah, berdasarkan prosedur keilmuan, (b) etika yaitu pengetahuan tentang baik-buruk, nilai, dan moral, (c) estetika, yaitu pengetahuan tentang indah-jelek, yang ada nilai seni. Berdasarkan pengelompokan isi kurikulum harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut; (a) mengan-dung bahan kajian atau topik-topik yang dapat dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran, dan (b) berorien-tasi pada standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

Disamping prinsip-prinsip tersebut, pengembangan kurikulum hendaknya juga memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam isi kurikulum, yaitu: (a) teori, yaitu seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan, (b) konsep, yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan, (c) generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari hasil analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian, (d) prinsip, yaitu ide utama pola skema yang adalah dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep, (e) prosedur, yaitu serangkaian langkah-langkah yang berurutan yang ada dalam materi pelajaran dan harus dilakukan oleh peserta didik, (f) fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dipandang mempunyai kedudukan penting, (g) istilah, yaitu kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus, yang diperkenalkan dalam materi, (h) contoh atau ilustrasi, yaitu sesuatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas, sehingga suatu uraian/pendapat menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pihak lain, (i)

definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal, suatu kata dalam gari besarnya, dan (j) preposisi, yaitu suatu pernyataan atau pendapat yang tak perlu diberi argumentasi.

c. Komponen Proses

Proses pelaksanaan kurikulum harus menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, yaitu upaya guru untuk membelajarkan peserta didik, baik di sekolah melalui kegiatan tatap muka, maupun di luar sekolah melalui kegiatan terstruktur maupun mandiri. Dalam konteks inilah, guru dituntut untuk menggunakan berbagai strategi pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar. Pemilihan strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan kurikulum (SK/KD), karakteristik mata pelajaran dan tingkat perkembangan peserta didik. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan isi kurikulum, antara lain; (a) strategi ekspositori klasikal, yaitu guru lebih banyak menyampaikan materi yang sebelumnya sudah diolah sendiri, sementara siswa lebih banyak menerima materi yang telah jadi, (b) strategi pembelajaran heuristik (*discovery* dan *inquiry*), (c) strategi pembelajaran kelompok kecil: kerja kelompok dan diskusi kelompok, dan (d) strategi pembelajaran individual.

Di samping strategi, ada juga metode mengajar. Metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyajikan isi kurikulum atau materi pelajaran sesuai dengan tujuan kurikulum. Sekalipun yang menggunakan metode pembelajaran adalah guru, tetapi tetap harus berorientasi dan menekankan pada aktivitas belajar peserta didik secara optimal. Untuk memilih metode mana yang akan digunakan guru dapat dilihat dari beberapa pendekatan yang berpusat pada peserta didik, dan pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Meskipun demikian. Tidak ada satu metode pun yang dianggap paling ampuh. Oleh

sebab itu, guru harus dapat menggunakan multimetode secara bervariasi.

Sumber belajar adalah bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran yang tradisional, penggunaan sumber belajar terbatas pada informasi yang diberikan oleh guru, dan beberapa diantaranya ditambah dengan buku sumber. Bentuk sumber belajar yang lain cenderung kurang berkembang. Berdasarkan pendekatan teknologi pendidikan, sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu manusia, bahan, lingkungan, alat dan perlengkapan, serta aktivitas.

d. Komponen Evaluasi

Untuk mengetahui efektivitas kurikulum dan dalam upaya memperbaiki serta menyempurnakan kurikulum, maka diperlukan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan usaha yang sulit dan kompleks, karena banyak aspek yang harus dievaluasi, banyak orang terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan. Evaluasi kurikulum memerlukan ahli-ahli yang mengembangkannya menjadi suatu disiplin ilmu. Evaluasi kurikulum juga erat hubungannya dengan definisi kurikulum itu sendiri, apakah sebagai kumpulan mata pelajaran atau meliputi semua kegiatan dan pengalaman anak di dalam maupun di luar sekolah. Berdasarkan definisi kurikulum yang digunakan akan dapat diketahui aspek-aspek apa yang akan dievaluasi. Untuk mengetahui aspek-aspek evaluasi kurikulum, dapat dilihat dari perspektif model evaluasi kurikulum. Dari hasil studi beberapa literatur dapat dikemukakan beberapa model evaluasi kurikulum, antara lain model *measurement* (Thorndike dan Ebel), model *congruence* (Ralp W.Tyler), model CIPP (Daniel L. Stufflebeam), model evaluasi sistem pendidikan, mode *illuminative* (Malcolm Palett), dan model *formative* dan *summative* (Scriven).

C. KESIMPULAN

Pengertian kurikulum di organisasi menjadi dua, kurikulum adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk insitusi pendidikan yang isinya berupa proses dan kompetensi yang harus dimiliki. Selanjutnya kurikulum adalah seluruh pengalaman di bawah bimbingan dan arahan dari institusi pendidikan yang membawa ke dalam kondisi belajar. Konsep kurikulum meliputi sebagai substansi yang dipandang sebagai rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai, sebagai sistem yang merupakan bagian dari sistem persekolahan, pendidikan, bahkan masyarakat, dan sebagai bidang studi yang merupakan kajian para ahli kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Kurikulum berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni memiliki peran konservatif, kreatif, kritis dan evaluatif.

Komponen kurikulum terdiri dari komponen tujuan, komponen isi dari apa yang dipelajari, komponen proses pembelajaran, komponen evaluasi untuk hasil hasil pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2013. ***Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum***. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dakir. 2004. ***Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum***. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Hamalik, Oemar. 2013. ***Kurikulum dan Pembelajaran***. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, S. Hamid. 1988. ***Evaluasi Kurikulum***. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- Hidayat, Sholeh. 2013. ***Pengembangan Kurikulum Baru***. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- McNeil, John, D. 1990. ***Curriculum a Comprehensive Introduction***. Glenview Illinois: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education.
- Nasution, S. 2003. ***Asas-asas Kurikulum***. Jakarta: Bumi Aksara.
- Schubert, William H. 1986. ***Curriculum: Perspective, Pradigm, and Possibility***. New York: McMillan Publishing Company.
- Sukmadinata, Nana Sy. 2005. ***Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek***. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Taba, Hilda. 1962. ***Curriculum Development: Teory and Partice***. New York: Harcourt, Brace word Inc.
- Unruh, Glenys G. dan Adolph Unruh. 1984. ***Curriculum Development: Problems, Processes, and Progress***. Barkeley, California: McCutchan Publishing Corporation.

KETENTUAN PEMUATAN NASKAH

Jurnal *Al-Risalah* menerima sumbangan naskah tulisan berupa artikel hasil telaahan dan penelitian, membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan disiplin ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah belum pernah dipublikasikan dan diketik di atas kertas HVS ukuran kwarto spasi ganda.
2. Panjang tulisan berkisar antara 12 – 20 halaman.
3. Artikel hasil telaahan harus memuat judul tulisan, nama penulis, abstrak (minimal 50 kata dan maksimal 75 kata) dan kata kunci (minimal 3 kata dan maksimal 5 kata). Tulisan juga memuat pendahuluan, deskripsi masalah, pemecahan dan penutup.
4. Artikel hasil penelitian harus memuat judul tulisan, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian yang diperoleh, pembahasan, analisis dan penutup.
5. Artikel yang menggunakan bahasa Indonesia dianjurkan abstraknya menggunakan bahasa Asing (Arab/Inggris) dan sebaliknya artikel yang menggunakan bahasa Asing (Arab/Inggris) abstraknya menggunakan bahasa Indonesia.
6. Biodata penulis harus dicantumkan pada halaman pertama tulisan dalam bentuk *footnote*.
7. Daftar kutipan dibuat dalam bentuk *footnote* (catatan kaki), sedangkan daftar pustaka dicantumkan pada halaman terakhir.
8. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris yang benar dan baik, sesuai dengan kaidah umum dan tata bahasa baku yang berlaku.
9. Redaksi penyunting berhak mengubah tulisan dan format redaksional, sepanjang tidak mengurangi isi dan maksud tulisan.
10. Naskah dikirim 1 eksemplar disertai file komputer (direkam di CD atau Flash Disk) dialamatkan ke Redaksi Jurnal *Al-Risalah* STAI RAKHA Amuntai, Jln. Rakha Pakapuran RT. 3 Amuntai Kab. HSU Prov. Kalsel 71471, e-mail : stai_rakha@yahoo.co.id
11. Naskah yang masuk menjadi hak redaksi dan tidak dikembalikan.

